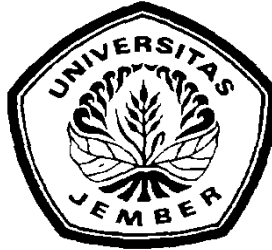


**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**BERKAYUH DI ANTARA DUA ARUS:
PERSEPSI MASYARAKAT MADURA DAN JAWA
TENTANG UANG, UTANG, DAN KREDIT**

Ketua	Dr. Sri Ana Handayani, M.Si.	NIDN : 0019096016
Anggota 1	Dra. Dewi Salindri, M.Si.	NIDN : 0006196121

Dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi
Universitas Jember Lembaga Penelitian
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian
Tahun Anggaran 2015
Nomor : 154/UN25.3.1./LT/2015 5 Februari 2015

**UNIVERSITAS JEMBER
NOVEMBER 2015**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi : (1) konsepsi kultural masyarakat Madura dan Jawa tentang uang, utang, dan kredit. (2) Bagaimana dampaknya terhadap penggunaan uang. (3) Membangun kesadaran penggunaan uang untuk produktivitas ekonomi masyarakat Madura dan Jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan, pengetahuan, dan kepercayaan etnik Madura dan Jawa mengenai uang. Melalui penelitian ini, dipaparkan pandangan masyarakat kedua etnik tersebut mengenai uang, utang, dan kredit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan historis-antropologis dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data sekunder meliputi karya-karya terbit, hasil penelitian, dan laporan pemerintah yang relevan dengan permasalahan yang digarap. Pengumpulan data primer menggunakan teknik observasi partisipasi dan wawancara.

Penelitian ini menyimpulkan pengetahuan dan pandangan tentang uang, utang, dan kredit. Uang dimaknai sebagai *special money*. Uang digunakan untuk keperluan ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan. Untuk itu, peran negara diperlukan untuk melibatkan tokoh formal dan informal, agar masyarakat menyadari tentang pentingnya kredit formal.

Kata Kunci : Uang, Utang, Kredit, produktivitas, *special money*.

SUMMARY

The Issues of the present research include ; (1) The conception of the Madurese and Javanese on money, debt, and credit. (2) How is the impact with their conception to use the money in their life. (3) To build the realization (awareness) on money can to build the economy productive of life among them.

The research aims at exploring the views, knowledge, and beliefs of the Madurese and Javanese on money, debt, and credit. More specially it tries to establish explanation to the questions of causes, the ways they treat, and to understand their views on pattern of economic life.

The research employs a combination of historical and anthropological methods. Historical method is used to handle historical materials in order to be able to uncover historical aspects of the issue, while anthropological method is used to deal with data stored in human memories. The research materials here include both primary and secondary sources. Primary sources collected by observation and interviews. Secondary sources consist of published materials, research reports, and newspaper reports others, which are relevant to the subject under consideration.

The research concludes that there are same conceptions among the two ethnic groups on money, debt, and credit in the former Besuki Residency. The money had special meanings in their daily activity. The money used for economics, socials, politics, and religious. Therefore, the active role of government is important to direct the people to adopt the formal credit pattern of life by involving prominent formal and informal figures.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, maka laporan kemajuan penelitian dengan judul “Berkayuh Di Antara Dua Arus: Konsepsi Masyarakat Madura dan Jawa tentang Uang, Utang, dan Kredit” dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini tim penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Jember yang telah memberi peluang untuk mendapatkan dana penelitian fundamental.
2. Bapak Ketua Lembaga Penelitian beserta staf yang telah memberikan banyak petunjuk penggunaan dana serta memberi ijin untuk mendapatkan data di yang diperlukan baik di instansi maupun di lapangan.
3. Bapak Dekan Fakultas Sastra yang telah memberi peluang kepada tim peneliti untuk penelitian.
4. Bapak Kepala Dinas BPS Jember, dan Arsip daerah Kabupaten Jember.
5. Bapak Kepala Dinas beserta staf Pariwisata Kabupaten Bondowoso.
6. Bapak Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, beserta staf yang telah mengizinkan peneliti menggali data.
5. Bapak Kepala Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso beserta staf yang telah memberikan informasi dan mengizinkan tim peneliti menggali data.
6. Bapak Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo beserta staf yang telah memberi informasi dan mengizinkan tim peneliti untuk menggali data.
7. Ketua pengurus dan staf Koperasi Mitra Bestari Desa Kilensari Kecamatan panarukan Kabupaten Situbondo.
8. Ketua pengurus dan staf Koperasi PNPM Desa Sumberejo Kecamatan bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
9. Ketua pengurus dan staf Koperasi Jember.

Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para perminat ekonomi mikro dan pengambil kebijakan. Saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca akan tim kami terima dengan lapang dada, demi perbaikan penelitian pada masa yang akan datang.

Jember, November 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
RINGKASAN		iii
SUMMARY		iv
PRA KATA		v
DAFTAR ISI		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Permasalahan	5
1.3	Tujuan	6
1.4	Manfaat	6
1.5	Urgensi	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1	Landasan Teori	10
2.2	Peta Jalan Penelitian	13
BAB III	METODE PENELITIAN	16
BAB IV	ISI DAN PEMBAHASAN	19
4.1	Pengantar	19
4.2	Penggunaan Mata Uang Tunggal dalam Lintas Sejarah	22
4.3	Uang, Utang, dan Budaya	27
4.3.1	Budaya Pengeluaran Uang Masyarakat madura	29
4.3.2	Budaya Utang Masyarakat Madura	34
4.3.3	Pergeseran Sistem Kredit	48
4.3.4	Budaya Pengeluaran Uang Masyarakat Jawa	60
4.3.5	Budaya Utang Masyarakat Jawa	65
4.3.6	Pergeseran Sistem Kredit	69
Bab V	KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA		82
FOTO KEGIATAN		86

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang, utang dan kredit merupakan fenomena yang selalu menjadi bahan kajian para ilmuwan terutama pakar ekonomi karena fenomena tersebut perlu dipahami secara mendalam. Dalam paradigma ekonomi, uang dipandang sebagai sesuatu yang anonim secara budaya dan netral secara sosial, uang dipandang sebagai instrumen pertukaran semata. Adapun paradigma sosial memandang, bahwa fungsi uang bukan semata-mata sebagai alat tukar melainkan juga punya makna sosial, budaya, politik, bahkan religi.

Para pakar budaya yang mengamati pola perilaku ekonomi manusia melahirkan pandangan yang berbeda dalam mengamati tingkah laku ekonomi dalam kehidupan sosial budaya. Golongan pertama, memandang perilaku ekonomi dari segi ekonomi murni (golongan *formalist*). Golongan kedua, memandang perilaku ekonomi dari segi ekonomi, sosial dan budaya (golongan *substantivis*). Golongan formalis memandang bahwa manusia baik yang sederhana maupun yang modern memiliki kemampuan untuk dapat bertindak rasional. Sikap rasional ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memilih di antara alternatif yang ada, dan dalam memilih, maka unsur memaksimalkan (*maximization*) atau unsur keuntungan yang diharapkan merupakan pertimbangan yang penting. Golongan substantif, memandang manusia lebih diwarnai oleh suatu proses hubungan sosial yang bukan motif keuntungan semata-mata. Kaum formalis beranggapan bahwa manusia dalam tingkah laku ekonominya selalu mencari keuntungan, sedangkan golongan substantif beranggapan bahwa yang paling penting dalam memahami masyarakat dalam tingkah laku ekonominya adalah aspek hubungan sosial (Adimihardja,1983;34-35).

Polanyi (1957:265-268) berpendapat bahwa masyarakat tradisional menggunakan uang dengan tujuan khusus, kehidupan masyarakat masih diatur oleh sistem pertukaran yang bersifat resiprositas dan redistribusi, adapun masyarakat modern sistem pertuklaran diatur oleh pasar. Hal ini diperkuat oleh pendapar Damsar (2006:43-45), bahwa masyarakat yang masih sederhana atau

yang tinggal di pedesaan perilaku ekonominya masih bersifat subsisten atau hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam ekonomi subsisten, uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang juga berkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Fenomena uang berhubungan dengan fenomena sosial, budaya, politik, bahkan agama.

Di sisi lain, masyarakat modern memandang uang sebagai fenomena pertukaran yang mengandung tiga hal penting, yaitu pertama uang sebagai alat pembayaran, kedua standar, dan ketiga sebagai sarana pertukaran (Damsar, 2006:45). Uang sebagai alat pembayaran berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban terhadap objek-objek yang dapat dipindahkan kepada pihak lain. Uang sebagai standar menunjuk pada penyamaan sejumlah jenis barang yang berbeda untuk tujuan-tujuan tertentu yang berpijak pada pengertian dana dan neraca. Adapun uang sebagai sarana pertukaran di mana uang dapat dipertukarkan secara langsung. Dalam masyarakat modern transaksi dilakukan secara langsung, orang dapat melihat dan memegang langsung jumlah uang secara tunai sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Menurut Djojohadikoesoemo (1989), uang sebagai alat bayar, alat tukar, dan alat hitung. Dengan demikian, uang tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat seragam, sama, dan tunggal tetapi sebagai sesuatu yang beraneka warna. Uang dipergunakan secara berbeda sesuai dengan tipe interaksi sosial yang berlangsung.

Dewasa ini, ekonomi pasar dengan cepat menguasai negara-negara berkembang sebagai konsekuensi logis dari ekspansi kapitalisme global. Persoalan bagi negara berkembang adalah bagaimana ekonomi pasar itu dapat diterima serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Ekonomi pasar secara global dapat diartikan tempat pertemuan penjual dan pembeli, yang lebih dikaitkan secara institusional merupakan karakteristik utama dari sistem ekonomi pasar, atau kemudian dapat dikatakan dengan jelas bahwa sistem ini merupakan bentuk ekonomi kapitalis (Berger, 1987:17). Dalam masyarakat kapitalis, pasar dipahami sebagai sebuah institusi yang superior terhadap institusi institusi sosial lainnya yang berjalan atas logika *self regulating market* sehingga keberadaannya menjadi determinan dalam seluruh proses sosial.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan cepat mengadopsi lembaga-lembaga keuangan barat yang cenderung kapitalis. Terjadi transformasi sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan skala luas yang mempengaruhi lembaga tradisional, ada kalanya lembaga tradisional berdampingan dengan lembaga modern, akan tetapi ada juga yang berbenturan karena berbeda kepentingan di antara keduanya. Dalam hal ini uang memiliki realitas ganda. Kajian ini untuk menggali bagaimana masyarakat Madura dan Jawa memaknai uang, bagaimana penggunaan uang dalam aktivitas ekonomi, serta apakah ada hubungan antara uang dengan moral, sosial, politik, dan agama.

Peranan uang semakin penting bagi masyarakat yang telah memasuki monetisasi. Uang berkaitan dengan utang. Utang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan kecukupan uang itu sendiri. Para ekonom memandang utang diperlukan bagi pembangunan nasional pada tataran ekonomi makro dan sebagai modal pada tataran mikro. Akan tetapi, secara budaya pada tataran mikro dampak dan makna utang dalam benak masyarakat merupakan konstruk sosial yang dibangun atas dialektika antara realitas objektif masyarakat dan realitas subjektif aktor tentang hutang. Pemahaman utang-piutang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia berbeda-beda seperti pada umumnya komunitas pedesaan di Jawa berusaha untuk tidak membicarakan masalah utang-piutang secara terbuka, karena utang merupakan urusan pribadi yang tidak usah dipublikasikan (Nugroho: 2000). Bagaimana masyarakat Madura dan Jawa melakukan utang piutang, yang jelas realitas sosial utang piutang menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pengertian kredit adalah pertukaran barang sekarang dengan barang saat yang akan datang, semakin besar jarak antara sekarang dengan masa yang akan datang, semakin kecil penghargaan akan barang yang akan datang (Hatta,1946:15). Kredit itu memungkinkan orang mendapatkan uang atau barang yang dikehendaki, dalam hal ini uang sebagai alat bayar dalam transaksi berkredit di antara kreditor dan nasabah kredit. Uang secara ekonomi berguna sebagai pembayaran kontan untuk arus kredit dan sebagai pembayaran rekening supaya kredit itu terus mengalir. Untuk menghindari bunga tinggi, maka uang kontan adalah alat untuk mengendalikan sistem kredit, dan merupakan bentuk luwes dari

kekuasaan ekonomi, dan karena itu dianggap tinggi nilainya (Geertz, 1989: 49). Menurut Hanley (200:1-2) kredit dan utang merupakan sumber daya yang berharga pada saat diperlukan tetapi sekaligus merupakan beban yang paling ditakuti, bukan saja oleh masyarakat miskin melainkan juga oleh orang kaya dan berkuasa terutama yang berkaitan dengan spekulasi keuangan. Kredit menunjukkan kepercayaan, persetujuan, dan pemberdayaan, adapun hutang menunjukkan kewajiban, kendala, dan bahaya.

Sumber untuk mendapatkan kredit bagi masyarakat adalah kredit formal dan non formal. Kredit formal berada di bawah payung hukum pemerintah adapun nonformal tumbuh di luar hukum pemerintah. Kredit formal disediakan oleh bank umum, sedangkan kredit non formal ditawarkan oleh kreditor seperti *paket rolasan* (dua belas hari), *patlikuran* (dua puluh empat hari) *telungpuluhan* (tiga puluh hari), dan *sewidakan* (dua bulanan). Kredit informal ini lebih dikenal sebagai bank *titil*. Dari hasil penelitian Partadiredja (1982:217-219) tentang kredit non formal ada tiga kriteria keuntungan yang didapatkan oleh kreditor, pertama seorang kreditor mengambil keuntungan sekitar 10-16% bagi rakyat miskin yang meminjam keuangan untuk keperluan makan. Kedua keuntungan sekitar 23% untuk peminjaman uang dengan perjanjian produk dijual sebelum panen. Ketiga keuntungan para rentenir rata-rata sekitar 30-60% perbulan apabila ada yang meminjam uang dengan anggungan hak panen. Pada umumnya pemilik modal seperti ini berprofesi sebagai pedagang juga. Kredit non formal sangat memberatkan nasabah secara ekonomi karena bunga yang diterapkan sangat tinggi (Partadiredja, 1982).

Pemerintah menyediakan dana perkreditan untuk masyarakat pedesaan seperti KUD (Koperasi Unit Desa), KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Pembangunan). Akan tetapi, respons dari masyarakat belum menggembirakan karena dianggap hanya menguntungkan golongan masyarakat lapisan atas pedesaan saja (Partadiredja:1982). Berbeda dengan institusi pegadaian di mana nasabah pegadaian dari waktu ke waktu meningkat, menurut data dari kantor pusat Perum Pegadaian jumlah nasabah pada tahun 1991 jumlahnya 3,156 juta orang pada tahun 1995 menjadi 4,757 juta orang (Damsar, 2006: 170). Tahun

1997 rumah pegadaian diminati oleh masyarakat dari golongan kelas bawah sampai menengah atas untuk menggadaikan barangnya sehubungan dengan krisis moneter (Suara Merdeka, 30 Desember 1997). Masyarakat sekarang merasa familier dengan institusi pegadaian yang berslogan “mengatasi masalah tanpa masalah”. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah apabila fasilitas itu dianggap nyaman dan aman. Untuk itu, bagaimana konsepsi tentang kredit dipahami oleh masyarakat Madura dan Jawa terhadap utang dan kredit, maka perlu ada kajian yang komprehensif agar mereka tidak terjebak dalam arus perputaran kredit rentenir (bank *tital*) yang hanya menguntungkan pihak pemilik uang semata-mata.

Sumbangsih dari riset sosial yang meneliti tentang pemahaman masyarakat tentang uang, utang, dan kredit dalam kebudayaan tertentu, akhirnya menjadi penting dalam mencari jawabannya. Berbagai pengalaman yang dapat diambil dari disiplin ilmu sosial guna mencari inspirasi menuju pemahaman baru, bahwa penanganan kesejahteraan keluarga tidak terlepas dari faktor budaya yang melingkupi kehidupan mereka sehari-hari. Persoalannya ialah, bahwa fungsi uang, utang, dan kredit selalu diukur dari kaca mata ekonomi. Pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat terlepas dari sisi budaya yang telah terinteranalisasi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini, rakyat dianggap sebagai obyek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan. Bahkan, kemiskinan terkontaminasi oleh kekuasaan, yang mengakibatkan kemiskinan menjadi komoditas politik dari para elit, baik legislatif maupun yudikatif dalam pemerintahan.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan perlu didengar suaranya. Kajian pertama adalah pemahan mereka tentang uang, utang, dan kredit, kemudian memetakan pola perilaku ekonomi dan sosial mereka, mencari faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang konsep uang, utang, dan kredit. Mencari solusi melalui rekayasa sosial sebagai strategi meningkatkan kehidupan perekonomian mereka. Dengan demikian diharapkan, masyarakat Madura dan Jawa sebagai etnis lokal memperoleh pemahaman uang, utang, dan kredit menurut konsep pembangunan nasional.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fenomena uang, utang, dan kredit merupakan fenomena masyarakat yang memerlukan pemahaman secara memadai. Berdasarkan penelitian tahun pertama, diperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat Madura dan Jawa tentang uang, utang, dan kredit. Pada umumnya orang Madura dan orang Jawa memahami uang sebagai alat bayar, alat tukar, dan alat hitung (instrumen ekonomi). Pemahaman uang sebagai *special money* sekan-akan lebih dominan dibandingkan dengan *all purpose money*. Dalam era global ini, perlu diadakan suatu pemahaman baru tentang uang, utang, dan kredit berdasarkan basis sosial budaya yang telah terbentuk. Permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian lanjutan ini adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi modern, terutama yang berkaitan dengan utang piutang dan kredit tradisional berdasarkan kontribusi sosial budaya sebagai bentuk kearifan lokal. Guna memperoleh pemahaman yang utuh, maka permasalahan utama tersebut akan dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pola perilaku ekonomi masyarakat Madura dan Jawa?
2. Seberapa kuat pemahaman orang Madura dan Jawa terhadap konsep *special money* dan *all purpose money*?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman tentang konsep *special money* dan *all purpose money*?

1.3 Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memetakan pola perilaku ekonomi masyarakat Jawa dan Madura.
2. Menggali pemahaman mereka tentang uang, utang, dan kredit dari aspek *special money* dan *all purpose money*.
3. Mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang *special money* dan *all porpuse money*.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus atau kajian etnisitas yang berkaitan dengan pemahaman perspektif masyarakat Madura dan Jawa tentang uang, utang, dan kredit. Secara pragmatis penelitian ini akan bermanfaat sebagai landasan berpijak bagi model rekayasa sosial dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat yang memahami uang sebagai alat bayar, alat tukar, dan alat hitung dalam perspektif ekonomi modern.

1.5 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai persepsi masyarakat Madura dan Jawa terhadap Uang, utang, dan kredit sangat urgen. Penelitian yang mengungkapkan permasalahan uang dari segi sosial budaya dapat melahirkan seperangkat pengetahuan mengenai bagaimana cara pandang masyarakat Madura dan Jawa terhadap uang sehingga perilaku ekonomi masyarakat secara faktual dapat dipahami dari sisi budaya selain ekonomi. Urgensi penelitian ini berkaitan dengan beberapa hal yaitu:

1. Penelitian ini dalam rangka penanganan masalah utang piutang baik secara formal maupun non formal. Banyak hal telah dilakukan pemerintah untuk membangun kesejahteraan melalui kredit lunak seperti kredit *candak kulak*, KIK, KMKP maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM. Akan tetapi, capaian keberhasilan dan sasaran bantuan belum sesuai dengan target. Kegagalan terjadi karena kebijakan bersifat *top down*.
2. Penelitian ini urgen mengingat bahwa penanganan kemiskinan melalui bantuan pinjaman dengan bunga rendah dan Bantuan Langsung Tunai belum optimal implementasi dan hasilnya, karena masyarakat miskin masih terjerat dan bergantung pada pemberi kredit non formal yang menerapkan bunga tinggi. Sementara itu, pemanfaatan pinjaman melalui institusi formal belum menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap masih terlalu birokratis. Hal ini tetap berlangsung karena diabaikannya jalur budaya dalam program kebijakan ekonomi. Untuk menuju masyarakat yang sejahtera bukan berarti dibantu secara ekonomi dengan upaya teknis kuratif semata-mata, melainkan juga aspek sosial budaya perlu menjadi perhatian agar masyarakat dapat

menggunakan uang secara benar. Dengan mengeksplorasi konsepsi budaya masyarakat Madura dan Jawa mengenai uang, utang, serta kredit, penelitian ini membuka jalan bagi terciptanya masyarakat sejahtera melalui bantuan yang terorganisasi dan formal.

3. Fokus penelitian terhadap masyarakat etnik Madura dan Jawa dalam jalur budaya yang berkaitan dengan permasalahan uang, utang, dan kredit merupakan jalur yang strategis. Alasannya, populasi etnis Jawa secara kuantitatif merupakan kelompok terbesar di pulau Jawa. Apabila kesejahteraan masyarakat etnik ini dapat tertangani, maka penciptaan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat tertangani pula. Adapun etnik Madura termasuk ke tiga terbesar setelah Jawa dan Sunda. Mayoritas masyarakat Madura di pedesaan masih belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai.
4. Penelitian ini urgen dalam rangka mencari rekayasa sosial budaya yang potensial untuk membangun pola hidup hemat dan sehat dengan adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah eks Keresidenan Besuki dengan pertimbangan bahwa etnis Madura dan Jawa banyak tinggal di eks Keresidenan Besuki yang sekarang melingkupi daerah kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Sebagian masyarakat Madura dan Jawa masih tinggal di pinggiran kota yang termasuk pedesaan dengan pola pikir yang masih cenderung tradisional, sementara masyarakat yang tinggal di pusat kota hidup dengan budaya urban. Dengan mengkomparasikan antara ke dua tipologi masyarakat desa dan kota, maka akan didapatkan kajian yang lebih komprehensif.

Secara ekonomis wilayah seperti Jember merupakan daerah penyangga aktivitas ekonomi pedalaman di Jawa Timur selain sebagai pusat kota administrasi, perdagangan, dan pendidikan yang didukung oleh wilayah lain sebagai daerah subur penghasil produksi pangan dan bahan perdagangan, sehingga kehidupan ekonominya sangat ditentukan oleh sektor pertanian dan perkebunan. Demikian juga wilayah Situbondo, sebagai wilayah penyangga

ekonomi di Jawa Timur Utara. Kondisi geografi dan sosial akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakatnya (Kuntowijoyo, 2002: 84). Masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan di daerah baru, timbul proses pertumbuhan nilai-nilai baru yang memberikan peranan dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *economic rationality* (Whertheim, 1989).

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dari instansi terkait, baik pusat maupun daerah khususnya bergerak di bidang ekonomi mikro dalam merancang dan melaksanakan bantuan kebijakan keuangan bagi masyarakat kecil agar mampu mandiri menuju tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

BAB 11. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Persoalan uang, utang, dan kredit merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dikaji dari berbagai disiplin ilmu, karena permasalahan ini sudah menjadi fokus kajian pemerintahan Belanda sejak tahun 1900-an. Berkaitan dengan penulisan sejarah perekonomian yang telah meluas sekitar tahun 1970-an di Indonesia, maka penulisan sejarah perekonomian tentang sejarah masyarakat pedesaan dalam arti sosial ekonomi semakin luas. Pengkajian pandangan masyarakat terhadap uang, utang, dan kredit perlu menjadi fokus perhatian para peneliti sejarawan juga.

Secara historis, kajian mengenai perkreditan serta kehidupan perilaku ekonomi masyarakat Indonesia sudah banyak dikaji oleh ilmuwan dan pemegang kebijakan era kolonial Belanda terutama awal abad ke-20. Kajian yang membahas tentang kehidupan dan kondisi ekonomi masyarakat bumiputera era kolonial antara lain, O.P. Besseling (1919), J.C.W. Cramer (1929), Boomgaard (2004), Boeke (1929) serta Van Gutem. Baru abad ke-20 masyarakat bumi putera terutama masyarakat pedesaan menjadi fokus perhatian dan kajian para ilmuwan dan pengambil kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Tujuannya untuk menerapkan politik etis yang berslogan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bumi putera melalui program pendidikan, emigrasi dan irigasi. Salah satu program kebijakan pemerintah di bidang irigasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian adalah membentuk lembaga kredit formal untuk rakyat yaitu *Vokskreditwezen*

Pada dasarnya mereka menguraikan tentang kemiskinan yang dialami oleh masyarakat bumiputera karena ketidakberdayaan mereka, terutama faktor budaya masyarakat bumiputera yang fatalistik. Boeke (1929) mencetuskan teori ekonomi dualisme, di mana ia berpendapat bahwa ekonomi bumiputera tidak akan maju selama hidup dalam ekonomi tradisional yang tidak memperhitungkan rasionalitas perekonomian. Teori yang diungkapkan menjadi suatu pembenaran bagi pemerintah kolonial yang mengakui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan masih berada di bawah garis kemiskinan karena mentalitas.

Fokus kajian yang berkaitan dengan peran pemerintah adalah pemberian kredit melalui *volkscreditwezen* yang mengalami kerugian terutama masa krisis sehingga pemerintah berusaha membentuk lembaga kredit yang terpusat (Cramer, 1929) yang dikemudian hari menjadi BI. Aspek penting yang tidak digali dalam tulisan-tulisan mereka adalah keragaman etnis di Nusantara secara mendalam terutama pemahaman tentang fungsi uang dalam perilaku ekonomi bumiputera sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung berdasarkan konsep ekonomi semata-mata (Djoyohadikusumo, 1989).

Kajian Boomgaard (2004) dengan judul *Children of Colonial States: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Anak Jajahan Belanda : Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Boomgaard mengemukakan pendapatnya bahwa dalam kurun waktu 1815-1889 meskipun mayoritas terbesar dari penduduk di Jawa bekerja di sektor pertanian, akan tetapi semakin banyak penduduk di daerah pedesaan terlibat dalam kegiatan non pertanian sebagai sumber penghasilan tambahan. Sistem tanam paksa pada dasarnya telah menciptakan tenaga kerja paksa, tetapi setelah tahun 1870-an banyak tenaga kerja yang diupah menggantikan tenaga kerja paksa sebagai konsekuensi dari sistem perusahaan swasta. Kegiatan pertanian yang digerakkan oleh masyarakat di Jawa selama abad kesembilan belas telah mengalami berbagai perubahan struktural. Karya Boomgaard dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk memahami moneterisasi di pedesaan Jawa dan Madura abad ke-19.

Disertasi Djojohadikusumo dengan judul *Het Volkscreditwezen in De Depressie* tahun 1942 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kredit Rakyat Di Masa Depresi* (1989) memaparkan dengan detail tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan, sirkulasi keuangan di pedesaan, serta kebutuhan kredit yang dirasakan oleh masyarakat desa, penanganan perkreditan oleh Pemerintah Hindia Belanda secara resmi dalam bentuk *volkscredietwezen*.

Pendapatnya yang sangat menarik untuk dicermati adalah bahwa pada masa itu telah terjadi ketimpangan perimbangan kekuatan perekonomian antara

golongan produsen di satu sisi dengan golongan pelaku ekonomi lainnya. Ketimpangan perimbangan kekuatan perekonomian, menjadi sumber utama bagi gejala perkreditan dalam kehidupan petani yang seolah-olah merupakan kebutuhan pokok petani. Ketimpangan perimbangan perekonomian secara struktural inilah yang mengakibatkan petani terjerat dalam kredit tidak resmi dengan bunga yang sangat tinggi, berakhir menjadi beban yang bersifat kronis dan semi permanen. Hanya saja kredit yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat berakhir menjadi bank yang sifatnya *populer banks* daripada *people's bank*.

Perbedaan sudut pandang mengenai sebab-sebab mengapa masyarakat bumiputera selalu hidup di garis kemiskinan di era kolonial menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh. Dari sudut pandang ilmuwan Belanda lebih menekankan akan kehidupan budaya ekonomi yang tidak mendukung akan kemajuan ekonominya, perilaku ekonomi masyarakat cenderung dinyatakan boros, tidak rasional, malas sehingga tidak dapat memasuki era ekonomi modern. Sementara menurut ilmuwan Indonesia yang tertarik akan ekonomi mikro menganggap bahwa kemiskinan yang terjadi karena sistem ekonomi kolonial yang tidak memihak kepada masyarakat bumiputera dengan ekonomi kapitalisnya. Peluang bagi bumiputera untuk berperan di bidang ekonomi internasional sama sekali tidak ada.

Perkreditan di Amerika pun menjadi bahan kajian para ilmuwan Amerika untuk memperbaiki sistem kredit di kalangan masyarakat petani Amerika. Butz mengkaji sistem perkreditan petani di Amerika dalam periode 1933-1943 dalam karyanya. *The Production Credit System For Farmer*. Karya Perkreditan petani di Amerika telah menjadi bahan perdebatan yang cukup panjang terutama bagaimana cara meningkat produksi dan produktivitas petani serta perlindungan negara terhadap petani. Lembaga perkreditan diharapkan dapat meningkatkan produksi petani. Butz berhasil mengungkapkan perubahan serta kebijakan untuk mengatasi permasalahan perkreditan petani di Amerika. Ia memberikan penjelasan yang cukup detail tentang sistem kredit produksi. Pada awalnya permasalahan kredit petani di Amerika pada waktu itu relatif dianggap masalah kecil. Setelah Butz

menulis permasalahan kredit petani, maka akhirnya perkreditan bagi petani menjadi perhatian utama dunia dalam rangka merangsang petani untuk meningkatkan produktivitasnya.

Dari berbagai tinjauan pustaka di atas, maka dalam penelitian digunakan kerangka teori yang dapat menjelaskan tentang persepsi masyarakat etnis Madura dan Jawa melalui kerangka teori yang dibangun oleh Zelizer (1989) yaitu perspektif *special monies*. Dalam perseptif *special monies*, fenomena uang tidak hanya dipahami dalam ruang ekonomi, tetapi fenomena uang yang terbentuk dalam masyarakat sebagai konstruksi sosial melalui proses eksternalisasi, obyektivitasi, dan internaliasasi.

2.2 Peta Jalan Penelitian

Permasalahan uang, utang dan kredit tetap mnjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, sehingga berbagai kajian mengenai fenemena uang terus dilakukan para ilmwan Indonesia dan luar negeri. Kajian secara akademis yang membahas tentang uang, utang, dan kredit secara antropologis antara lain Nugroho (2000). Ia membahas tentang pandangan masyarakat di Kabupaten Bantul. Ternyata masyarakat memandang uang bukan hanya sekedar sebagai alat tukar dalam ekonomi semata-mata, melainkan juga memunyai fungsi sosial dan politik. Di sisi lain, secara ekonomi ternyata sirkulasi perkreditan non formal secara signifikan membantu peredaran uang dan roda perekonomian masyarakat. Temuan ini memberi inspirasi bagi peneliti untuk meneliti pandangan masyarakat Madura dan Jawa terhadap uang, utang, dan kredit.

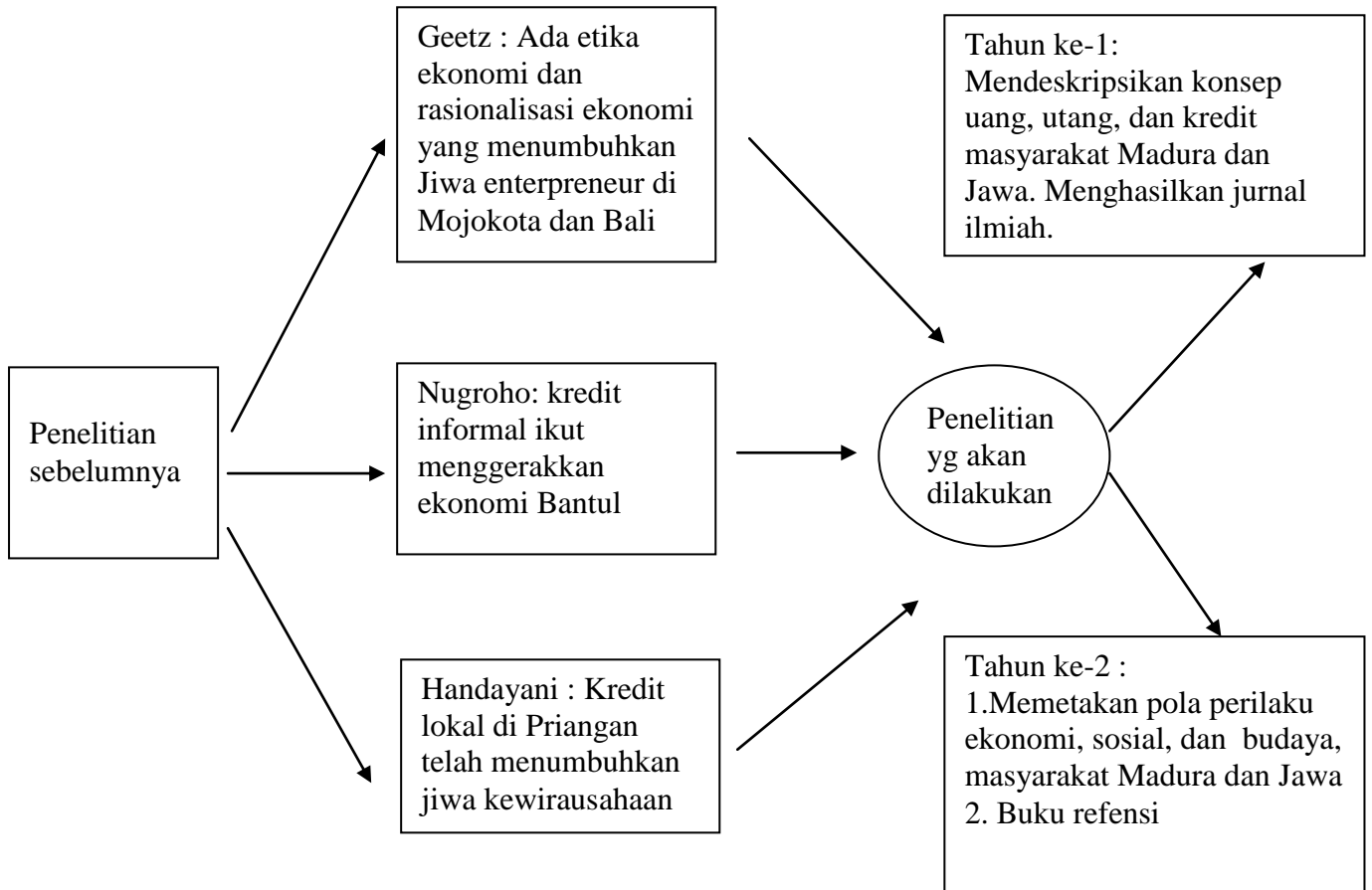
Geertz (1989) meneliti masyarakat di Mojokuto dan Tabanan Bali yang berkaitan dengan kewirausahaan masyarakat pribumi. Ia mengelompokan masyarakat ke dalam dua bagian tipe perekonomian, yaitu pertama tipe pasar dan yang kedua tipe firma. Dasar dari perbedaan tersebut karena ada dualisme masyarakat, yaitu masyarakat yang berkarakter perdesaan dan perkotaan. Karakteristik yang pertama terbatas pada permodalan, lemahnya sistem organisasi dan manajemen, mengabaikan faktor-faktor rasionalitas dan efesiensi, serta terkesan non profit oriented. Masyarakat perdesaan yang mayoritas mempunyai karakter seperti ini karena keterikatannya pada faktor alam yang kuat. Karakteristik yang kedua

walaupun permodalan tetap menjadi problem, tetapi kekuatan karena adanya dukungan infrastruktur yang kuat, organisasi yang solid, rasionalitas, efisien, dan berorientasi jauh ke depan.

Kajian Handayani (2012) secara historis, mengenai kredit di Priangan dengan periodisasi 1900-1942. Dalam kajiannya, dikatakan bahwa masyarakat Priangan pada era itu dapat beradaptasi dengan sistem ekonomi pasar. Masyarakat Priangan terutama di kota-kota perkebunan dan industri mengalami perubahan yang memungkinkan munculnya *economic rationality*, kemudian menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses perubahan kearah *economic rationality*, masyarakat Priangan dapat mengadopsi lembaga keuangan formal pemerintah dengan nilai-nilai tradisional sehingga menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang mandiri berdasarkan ikatan tradisional antara lain, patron klien dan kekeluargaan ke dalam nilai-nilai baru semacam *economic ethic locality* yang memberikan keleluasaan kepada *economic rationality* dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga kajian di atas memperlihatkan bahwa permasalahan uang, utang dan kredit berbeda di setiap daerah karena keberagaman etnis yang mempengaruhi pemahaman akan uang. Oleh karena itu, penelitian tahun pertama ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap uang, utang, dan kredit dalam konteks masyarakat Madura dan Jawa serta memetakan pola perilaku ekonomi mereka. Selain itu, menghasilkan karya ilmiah dalam salah satu jurnal nasional. Tahun kedua dapat memberikan uraian untuk rekayasa sosial secara akademis dan pragmatis, serta menghasilkan buku referensi yang dapat menunjang mata kuliah etnisitas, sejarah ekonomi dan Sejarah kebudayaan Indonesia.

PETA JALAN PENELITIAN



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Mudyahardjo (1999:79-81) riset kualitatif meneliti masyarakat apa adanya, mendeskripsikan gambaran masyarakat yang diteliti berdasarkan kata-kata daripada angka-angka dengan analisis induktif karena tujuannya mengenali makna peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara alamiah. Untuk lebih memahami pandangan masyarakat Madura dan Jawa terhadap uang, utang dan kredit, maka peneliti menggunakan metode historis-antropologis digunakan.

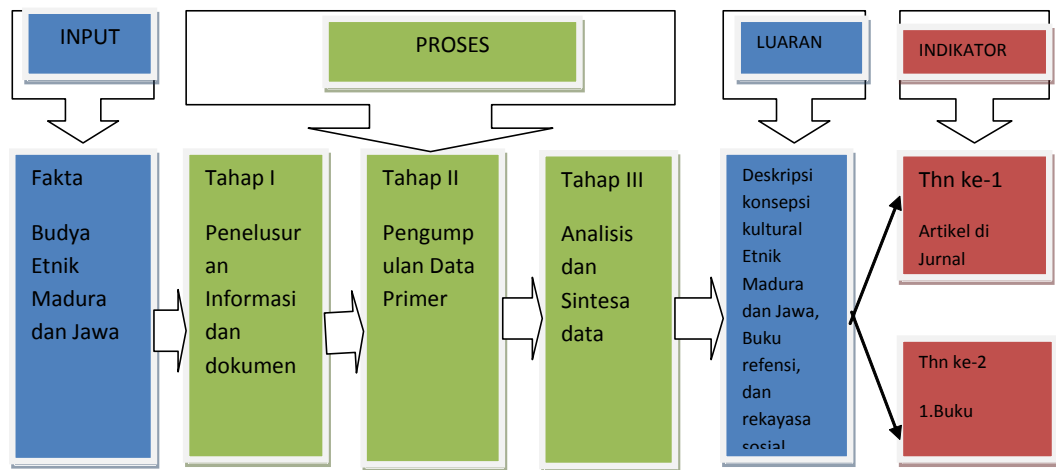
Pendekatan historis digunakan untuk mengungkapkan pandangan serta penggunaan uang pada masa lampau secara kronologis, selain itu mencari penjelasan mengenai berbagai faktor yang membawa perubahan bagi masyarakat, kajian historis dapat memahami masyarakat secara diakronis (Nawawi, 1985:78-79). Adapun pendekatan sosiologis-antropologis mengenai uang agar dapat menjelaskan bagaimana masyarakat memahami uang dalam perilaku ekonomi (Damsar, 2000:17). Data sekunder berupa arsip dan laporan pemerintah, buku karya-karya hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang digarap akan dicari di berbagai perpustakaan. Pencarian sumber dokumenter juga dilakukan di perpustakaan daerah eks Keresidenan Besuki. Analisis data dilakukan dengan analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan cara untuk mengungkapkan informasi dari dokumen, laporan resmi, dan buku-buku mengenai berbagai aspek sosio kultural (Nawawi, 1985: 68).

Sumber primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu observasi partisipan (Moleong, 1999.). Data primer diperoleh melalui interview, baik terstruktur maupun tidak. Interview terstruktur berdasarkan pada kuesioner, sedangkan tidak terstruktur berdasarkan pada observasi partisipan.

Masyarakat yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat etnis Jawa dan Madura di eks Karesidenan Besuki baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Dari populasi ini ditentukan sejumlah sampel di masing-masing lokasi dengan mempertimbangkan unsur representativitas baik dari segi

desa-kota maupun heterogenitas sosial. Dalam penanganan sample, peneliti menggunakan teknik sampling acak berdasarkan pada pertimbangan bahwa teknik ini lebih egalitarian karena semua anggota sampel mempunyai peluang yang sama untuk memberikan informasi (Labovitz dan Hagedorn, 1982:62).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, kelompok, maupun institusi. Responden yang akan diwawancarai tokoh masyarakat baik formal maupun informal, tokoh agama, warga masyarakat, birokrat terutama yang berkaitan dengan perkreditan bagi masyarakat. Tahap proses penelitian secara skematis ada dalam bagan di bawah ini:



3.2 Luaran Penelitian

Luaran kegiatan penelitian tahun pertama adalah mendeskripsikan, memaparkan mengenai pandangan etnik Madura dan Jawa terhadap uang, utang, dan kredit, serta menghasilkan jurnal ilmiah. Tahun ke dua diharapkan dapat memetakan pola perilaku ekonomi secara lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan rekayasa budaya yang sesuai dengan keartifan lokal.

Indikator capaian penelitian ini adalah artikel ilmiah, buku ajar, dan model pemberdayaan masyarakat. Artikel ilmiah diharapkan dapat dikirim ke jurnal nasional terkreditasi. Buku referensi yang dihasilkan akan menunjang dan memperkaya pembelajaran mata kuliah yang diampu, yakni Sejarah Kebudayaan Indonesia, Etnisitas, Sejarah Ekonomi, Sejarah kota, dan Sejarah Pedesaan. Model rekayasa budaya yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi panduan dalam

pengembangan perkreditan atau ekonomi mikro yang beragam dalam komunitas etnik Jawa dan Madura pada umumnya.

IV ISI DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengantar

Berbicara mengenai uang, maka yang pertama-tama harus ada kejelasan adalah mengenai pengertian uang. Nataatmaja (1984:141-143) seorang ahli ekonomi humanistik mendefinisikan uang sebagai sertifikat kreasi, yang dijadikan alat tukar yang syah melalui undang-undang. Dari defenisi ini muncul hak kepemilikan uang, apabila pemerintah atau seseorang mencetak uang tanpa jaminan kreasi, maka pemerintah atau seseorang tersebut dianggap melakukan penipuan. Uang yang dicetak tanpa jaminan kreasi adalah uang palsu. Uang tidak lain semacam IOU (*I Owe You*) yang berarti pernyataan hutang pemerintah pada masyarakatnya senilai angka nominal yang tertera pada mata uang tersebut. Uang mempunyai arti yang penting, mengingat uang sebagai sertifikasi kreasi dan sebagai alat tukar yang syah, maka makna uang pun perlu diketahui. Menurut Nataatmadja (1984:151), makna uang adalah:

1. Uang sebagai sertifikasi kreasi
2. Uang sebagai alat tukar
3. Uang sebagai tanda IOU
4. Uang sebagai aset dan alat spekulasi

Uang yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat dunia adalah sesuatu yang dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar. Suatu benda dapat dikatakan sebagai uang apabila memenuhi berbagai syarat, yaitu disukai umum, mudah disimpan, mudah dibawa ke berbagai wilayah, mudah dibagikan, tidak mudah rusak, dan mempunyai kestabilan atau ketetapan nilai uang tersebut. Adapun fungsi uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), alat penimbunan kekayaan, dan sebagai standar untuk melakukan pembayaran kembali dikemudian hari, pembayaran jangka pendek atau pencicilan utang (Sinungan,1991:5-8; c.f. Djojohadikusumo,1989).

Uang merupakan kebutuhan yang utama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah sangat membutuhkan uang untuk mensukseskan program-program pembangunan, sementara masyarakat sangat membutuhkan uang untuk menjalankan sektor industri, pertanian, serta produksi lainnya juga

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya uang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dan berkaitan dengan kehidupan ekonomi karena setiap usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan alat yang dinamakan uang (Sinungan,1991:4).

Para pakar ekonomi, terutama ekonomi klasik berpendapat bahwa uang itu bersifat netral, tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat maupun negara. Akan tetapi, pada kenyataannya peranan uang itu tidak netral dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Hal ini berkaitan dengan pola kehidupan manusia, di mana manusia sendiri mengumpulkan uang bukan digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun hidup bermasyarakat, juga digunakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia. Dengan demikian manusia berusaha untuk mencari uang dengan cara apapun, antara lain melakukan utang atau kredit. Hal negatif yang terjadi adalah uang dapat mengendalikan manusia. Jadi ilmu tentang uang atau ilmu moneter harus mendapat perhatian yang layak di masyarakat, karena mempunyai arti yang sangat penting bagi pengaturan kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara (Sinungan,1991:5).

Secara teoritis, kajian ekonomi tentang uang dititikberakkan kepada uang sebagai instrumen ekonomi yang rasional, maksudnya uang sebagai alat pembayaran yang tidak terbebani dengan makna-makna ekstra ekonomi (*all purpuse*). Sementara, Secara sosiologis, uang memiliki dua wajah, di satu sisi berwajah normatif di sisi lain berwajah pragmatis. Di antara keduanya terjadi dikrepansi atau kesenjangan yang tajam, antara bagaimana uang seharusnya digunakan tentunya berlandaskan norma-norma sosial dengan uang yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan praktis sehari-hari. Secara normatif, uang hanya sekedar instrumen ekonomi dan penggunaannya untuk kenaikan status sosial sosial, tetapi secara pragmatis uang merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dapat membebaskan orang dari berbagai bentuk kewajiban sosial, bisa meningkatkan kapital budaya, dan menjadi instrumen kekuasaan personal yang riil yang ada dalam saku pemilikinya sehingga dapat mempengaruhi orang lain.

Dapat dikatakan secara antropologi uang digunakan sebagai ekspresi simbolik dalam proses kebudayaan (*special purpose*) (Nugroho,2001).

Peranan uang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arus globalisasi, maka pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program kebijakan kredit dengan bunga rendah melalui lembaga keuangan yang modern. Di satu sisi, lembaga keuangan modern yang dibentuk pemerintah belum dapat dimaknai secara rasional oleh masyarakat, karena adanya perbedaan persepsi mengenai makna uang itu sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengenal istilah uang, utang dan kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain, utang piutang terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai transaksi ekonomi di masyarakat. Seseorang yang meminjamkan harta bendanya kepada orang lain dapat dikatakan memberikan utang. Adapun istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara umum kredit lebih mengarah pada pemberian pinjaman dan penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit lebih banyak digunakan dalam perbankan (Nafis,2014). Secara esensial antara utang dan kredit tidak jauh berbeda dalam pemaknaan di masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk mengikuti pola ekonomi modern, termasuk membentuk lembaga keuangan modern. Pemerintah Indonesia berusaha menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi subsisten di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Pertumbuhan ekonomi di perdesaan telah merangsang aktivitas komersial dalam skala menengah maupun kecil. Aktivitas informal dipahami hanya memberikan sedikit kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, seperti pedagang kecil yang tidak terintegrasi dengan ekonomi nasional, bahkan menjadi sektor ekonomi yang terpinggirkan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menawarkan pinjaman dengan bunga rendah melalui lembaga finansial formal. Permasalahannya adalah pelaku aktivitas ekonomi dengan skala kecil

(dagang kecil) kesulitan memenuhi persyaratan administrasi bank. Tidak menutup kemungkinan mereka tetap mengandalkan rentenir sebagai penyelamat keuangannya. Pengusaha/pedagang kecil dan petani gurem tetap bergantung kepada rentenir dalam rangka mencukupi kebutuhan uang tunaninya.

Pemahaman tentang uang, utang, serta kredit dalam tataran mikro merupakan konstruk sosial yang dibangun atas dialektika antara realitas obyektif masyarakat dengan realitas subyektif aktor tentang uang, utang, dan kredit itu sendiri. Untuk itu, dalam kesempatan ini ingin mengungkapkan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan uang, utang, kredit dari persepsi masyarakat Madura dan Jawa dengan alasan bahwa daerah eks Keresidenan Besuki seperti Jember merupakan daerah penyangga aktivitas ekonomi di daerah pedalaman Jawa Timur. Selain itu juga sebagai pusat administrasi, kota pendidikan, dan perdagangan yang didukung oleh berbagai wilayah yang subur. Situbondo merupakan daerah yang pernah menjadi penyangga ekonomi terutama masa pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan adanya jalan Anyer sampai Panarukan. Sementara Banyuwangi tumbuh menjadi daerah tujuan wisata dengan berbagai ekonomi kreatifnya.

4.2 Penggunaan Mata Uang Tunggal di Nusantara dalam Lintas Sejarah

Sejarah peredaran uang di dunia berkaitan dengan perkembangan perdagangan di kota-kota dagang. Perkembangan perniagaan yang semakin besar dan dengan jarak jauh, serta kemajuan teknologi mengubah jenis uang, pada awalnya uang dalam bentuk uang logam (emas, perak, tembaga), uang kertas, dan uang elektronik (kartu elektronik).

Dari data sejarah, banyak ditemukan berbagai jenis uang di Nusantara yang pada waktu itu dijadikan sebagai alat bayar dalam perniagaan. Perdagangan menggunakan dua sistem barter untuk pedalaman dan market untuk daerah pesisir. Uang sebagai alat perdagangan sudah dikenal di kota-kota dagang di Nusantara. Menurut Reid (1993:96-98), di Asia Tenggara khususnya di Nusantara sekitar awal abad ke-14 sudah dikenal mata uang dari Cina yang di Jawa dikenal dengan uang *picis*, mata uang ini berlaku setelah adanya ekspedisi-ekspedisi Zheng He

sekitar abad ke-13 ke Asia Tenggara dan sampai di Jawa sekitar awal abad ke-14. Sejak pengaruh Cina semakin luas dalam perdagangan mata uang *kepeng* semakin dikenal di Jawa. Perdagangan era Islam mempengaruhi peredaran mata uang, mata uang dirham atau dinar terbuat dari emas berasal dari Arab di kenal di Nusantara setelah berdiri kerajaan Islam di Nusantara, seperti di Aceh. Perdagangan yang terjadi di Asia Tenggara menggunakan berbagai mata uang lokal. Uang Malaka yang dikenal dengan nama *calais*, dan mata uang Jawa yang diberi nama *tumdaya* atau *tail* (Cortesa dalam Reid:1993). Namun demikian, pada periode Islam kota-kota dagang sudah memiliki mata uang sendiri, seperti di Banten uang perak dan tembaga, Cirebon dari timah yang dikenal dengan *picis*, Banjarmasin tembaga, Sulawesi emas dan Timah (P. Creutzberd dan J.T.M. van Laanen C. eds.1980). Setelah orang Eropa datang ke Nusantara Portugis membawa uang mereka yang dikenal dengan *crusados* Belanda dengan nama *florin (gulden)*. Dengan demikian mata uang di Nusantara pun beragam, tidak ada mata uang tunggal dalam transaksi perdagangan.

Pada saat VOC dan pemerintah Belanda menguasai wilayah Hindia, permasalahan uang menjadi rumit karena pemerintahan lokal telah mencetak dan menggunakan uang lokalnya dalam bertransaksi. Pada saat Portugis masuk dalam perniagaan di Nusantara juga mengenalkan mata uang *piaster* (Lombard,2005:148-149). Ada dualisme penggunaan mata uang, Pemerintah Hindia Belanda bertransaksi dalam perekonomiannya menggunakan uang florin atau gulden, sementara masyarakat bumiputera menggunakan uang lokal, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Orang-orang Eropa menggunakan mata uang gulden untuk perniagaan yang berkaitan dengan barang ekspor, sementara masyarakat menggunakan uang lokal kebutuhan ekonomi dan transaksi perniagaan, sehingga masyarakat bumiputera tidak pernah ikut terlibat dalam perdagangan yang bersifat internasional atau modern (Cruetberg,1987). Standar uang dalam perniagaan menjadi tidak baku antara pemerintah dengan masyarakat.

Standar mata uang yang belum baku di wilayah Hindia Belanda membuat permasalahan perdagangan menjadi rumit, maka pemerintah Belanda mulai

mempertimbangkan untuk menggunakan mata uang tunggal di wilayah Hindia Belanda.

Pada tahun 1744, era VOC di bawah kekuasaan Gubernur Jendral Van Imhoff, mata uang tunggal sudah terpikirkan. Van Imhoff mengadakan kesepakatan dengan Sunan Mataram yaitu Pakubuwana I untuk mendirikan percetakan uang di Batavia, uang yang dicetak dalam bentuk dinar emas (dirham Jawi), kemudian dirham perak (Lombard,2005:149). Akan tetapi, percetakan uang ini tidak berjalan dengan baik, akhirnya ditutup. Kemudian tahun 1784 Van Imhoff mencoba mencetak dan menggunakan uang kertas dengan menerbitkan dua ribu obligasi yang masing-masing bernilai 1.000 rixdale, riwayat percetakan inipun tidak jauh berbeda dengan percetakan uang logam dinnar, mengalami kemunduran dan akhirnya ditutup.

Era pemerintahan Hindia Belanda mata uang pun menjadi perhatian pemerintah. Daendels awalnya menggunakan mata uang assignat, yaitu mata uang kertas yang pada awalnya dikeluarkan oleh Perancis pada masa revolusi Perancis. Raffles pun mengalami beberapa kendala pada saat penggunaan mata uang belum ada standar baku. Pada tahun 1854, pemerintah Hindia Belanda menggunakan mata uang gulden sebagai mata uang tunggal di seluruh Hindia Belanda. Hanya pada kenyataannya gulden digunakan oleh orang Eropa baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun transaksi ekonomi global, sementara masyarakat bumiputera terutama yang di pedesaan tetap menggunakan uang kepeng untuk memenuhi kebutuhan dan transaksi ekonomi lokal. Mata uang gulden sebagai mata uang tunggal di Nusantara dapat diberlakukan secara umum di Hindia Belanda sekitar tahun 1930-an (Lombard,2005:201).

Gagasan mata uang tunggal yang dirumuskan van Imhoff pada tahun 1744, yang diikuti oleh penggunaan uang gulden oleh pemerintahan Hindia Belanda secara merata di Nusantara pada tahun 1854, merupakan tonggak masuknya kebiasaan moneter Barat, walaupun penyatuan mata uang gulden di Hindia Belanda baru terlealisasikan kurang lebih sekitar satu abad kemudian.

Bagaimana masyarakat bumiputera memandang mata uang gulden, menarik untuk ditelusuri, hanya saja data yang berkaitan dengan pandangan

masyarakat terhadap uang gulden sangat sedikit. Menurut Creutberg (1987), pada umumnya masyarakat pedesaan dalam bertransaksi sehari-harinya masih menggunakan uang kepeng, kekayaan orang desa lebih banyak disimpan dalam bentuk barang (emas) atau tanah. Investasi yang besar terhadap barang atau tanah, mengakibatkan orang desa jarang memegang uang secara kontan, paling tinggi memegang gulden hanya sekitar f,1 saja. Perbedaan dalam memandang uang antara orang Eropa dengan bumiputera menjadikan orang-orang bumiputera terkalahkan dalam persaingan perniagaan yang bersifat nasional apalagi internasional. Hal inilah yang menjadikan sebagian besar masyarakat bumiputera pada waktu itu hidup dalam dualisme ekonomi, yaitu barter dan pasar.

Dapat dikatakan bahwa sistem liberalisme yang diterapkan tahun 1870-an, mengakibatkan peredaran uang di pedesaan semakin kompleks, karena upah buruh dibayar dengan uang kontan. Hal ini berbeda dengan sistem tanam paksa di mana tenaga kerja masyarakat bumiputera tidak dibayar dengan uang, tetapi merupakan kewajiban yang dibebankan tanpa ada kompensasi kerja berupa uang dari pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Akan tetapi, era liberalisme ini tidak mengangkat masyarakat dalam kesejahteraan karena upah yang diterima terlalu kecil dibandingkan dengan biaya hidup sehari-hari (Creutberg,1987). Ketidak seimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran, mengakibatkan sebagian besar masyarakat bumiputera terutama yang dipedesaan menjadi sangat bergantung kepada para pemberi kredit tradisional yang dinamakan, *mindring* (*rentenir*), *tengkulak*, *Ijon*, dan sebagainya.

Tradisi utang piutang secara tradisional inilah yang mulai mendapat perhatian pemerintah Hindia Belanda swkitar awal abad ke-20, karena ada kebijakan baru yaitu politik etis. Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk merangsang bumiputera ke dalam ekonomi produktif melalui lembaga keuangan, dengan jalan menyediakan kredit. Hanya saja karena nominal uang yang beredar di pedesaan sangat kecil, maka bank yang dibentuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Untuk itu, pemerintah mendirikan lembaga keuangan untuk rakyat yang dikenal dengan nama *volkcredietwezen* atau Kredit Rakyat, yang terdiri dari lumbung desa, bank desa, serta bank *afdeeling*. Sejak itulah,

masyarakat desa mulai mengemnal lembaga kredit modern yang sederhana. Lembaga kredit untuk orang Eropa sudah dibentuk terlebih dahulu sebagai bagian dari pendukung ekonomi modern mereka, yaitu untuk meningkatkan modal usaha, sedangkan rakyat menggunakan uang yang berasal dari kredit rakyat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya konsumtif.

Hal ini mempengaruhi konsep mereka tentang uang, utang, dan kredit. Orang Eropa memandang kredit sebagai bagian dari modal yang bermanfaat bagi ekonomi produktif, sementara orang bumi putera menganggap kredit sebagai bagian untuk mencukupi kebutuhan hidup yang sifatnya konsumtif. Cara pandang yang seperti itulah yang pada akhirnya membedakan tentang konsep uang, utang, dan kredit antara orang Eropa dan bumiputera era kolonial Belanda.

Pada saat Jepang menguasai Nusantara, terjadi krkacauan mata uang yang digunakan di Nusantara. Pemerintah Jepang menganggap uang gulden tidak berlaku sebagai alat bertransaksi, sementara uang Jepang atau uang NICA belum dapat beredar di Nusantara. Kekacauan politik dan pemakaian uang Jepang yang belum jelas mengakibatkan masyarakat bumiputera tidak dapat menggunakan uang Jepang atau uang gulden dalam bertransaksi. Hal ini mernjadi permasalahan tersendiri.

Pada awal Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara berdaulat, maka uang pun menjadi permnasalahan tersendiri. Uang menjadi perhatian pemerintah sebagai alat dalam transaksi ekonomi baik dalam negeri maupun dengan luar negeri. Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia mengeluarkan uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). Kondisi awal kemerdekaan yang tidak stabil karena permasalahan politik luar dan dalam negeri, mengakibatkan uang ORI ini nilai kursnya lemah, kemudian diubah menjadi rupiah. Era orde lama pun secara politik negara Indonesia selalu terjadi pergolakan yang berimbas kepada kondisi ekonbomi, mengakibatkan terjadi devaluasi rupiah yang tidak stabil. Untuk mengatasi nilau tukar rupiah dengan uang lainnya, maka pemerintaha Indonesia era Orde Baru mengubah kurs rupiah dengan cara mengkaitkan rupiah dengan dollar Amerika Serikat secara ketat. Setelah krisis moneter sekitar tahun 1998 an, maka rupiah mengikuti pergerakan pasar. Sejak itu pemerintah Indonesia dan

masyarakat harus dapat mengatasi berbagai permasalahan politik dan ekonomi, agar kurs rupiah tetap stabil atau realistis terhadap kurs dollar Amerika sebagai tolak ukurnya.

Berkaitan dengan perkreditan, pemerintah Indonesia tidak lepas tangan. Pemerintah berusaha memberikan sistem kredit yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama masyarakat dari kalangan bawah melalui berbagai kebijakan perkreditan. Tujuan dari kebijakan atau bantuan pemerintah membentuk berbagai lembaga bantuan sebagai lembaga kredit dengan bunga lunak adalah membantu warga miskin agar dapat mandiri di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan pemerintah antara lain, UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), bantuan dana kepada keluarga miskin dilakukan dalam program Takesra (Tabungan Kesejahteraan Keluarga) dan Kukesra (Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga), kemudian IDT (Inpres Desa Tertinggal), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan sebagainya.

Bagaimana pemahaman pemerintah terhadap warga dalam program mengentaskan kemiskinan, telah menurunkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama warga yang dianggap miskin. Di sisi lain, bagaimana masyarakat merespons berbagai kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan tersebut? Disinyalir, program-program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan dalam bentuk kredit lunak/ ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil.

Untuk itu perlu diungkapkan beberapa aspek yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan program pemerintah di masyarakat melalui penelitian di lapangan. Dalam hal ini akan dipapar tentang faktor yang melatar belakangi pandangan masyarakat Madura dan Jawa tentang uang, utang, dan kredit, respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta bagaimana masyarakat mengelola lembaga perkreditan mereka.

4.3 Uang, Utang, dan Budaya

Bagaimana peranan penting uang dalam kehidupan masyarakat tercetus dari beberapa pernyataan responden tentang uang. Pada umumnya responden akan

menyatakan bahwa uang penting dalam kehidupan manusia, walaupun ada juga yang menyatakan bahwa hidup bukan hanya mencari uang semata-mata, akan tetapi mereka menyadari bahwa uang akan mempermudah kehidupan mereka. Salah seorang responden mengatakan bahwa ” zaman sekarang zamannya uang, tanpa uang mau apa, uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, apabila engga punya uang hidup susah, kalau engga punya uang yang *direwangi ngutang*”. Jadi uang merupakan benda yang cukup penting menurut mereka.

Jenis uang yang diketahui oleh masyarakat tertama di pedesaan adalah uang kertas dan logam, karena uang kertas dan logam yang sehari-hari digunakan untuk bertransaksi. Uang yang beredar di masyarakat rata-rata sekarang uang kertas karena dianggap praktis. Uang logam dianggap tidak praktis karena nominal terbesar hanya RP. 1000,. Serta apabila dibawa dalam jumlah banyak menjadi berat. Uang logam hanya dimanfaatkan dalam lingkup yang lebih kecil, sebagai uang *kembalian* dari jual beli, atau untuk acara-acara ritual yang berkaitan dengan uang. Uang kertas yang beredar di masyarakat, seperti di pasar atau di kendaraan umum rata-rata kondisi uang kertas sudah lusuh tidak rapih dan kencang, karena perputaran uang kertas lebih cepat sementara penggantian uang kertas tidak cepat. Perpindahan dari satu tangan ke tangan lainnya tanpa ada tempat penyimpanan uang yang memadai mengakibatkan kondisi uang kertas lebih sering lusuh. Demikian juga dengan uang logam, kondisinya sudah tidak bagus, padahal perputaran uang logam jumlahnya lebih kecil karena nominal paling tinggi uang logam hanya Rp.1.000,. Masyarakat berusaha mendapatkan uang kertas yang masih utuh dan bagus pada saat menjelang hari raya Umat Islam atau Idul Fitri. Pada umumnya masyarakat akan menukar uang bernominal besar dengan uang kertas dengan yang nominal kecil (*receh*) ke bank-bank terdekat, karena pada hari raya inilah warga terutama yang sudah berumahtangga atau yang dituakan oleh warga akan membagi-bagikan uang recehkanya kepada warga terutama anak-anak. Pada hari-hari biasa uang yang sudah lecek atau kumal tetap dianggap uang yang berharga, akan tetapi apada saat hari raya diusahakan yang akan dibagikan harus bagus. Suatu bentuk budaya yang menghargai hal-hal yang

baru, seperti pakaian, kadang-kadang perabot rumah tangga, bahkan uang pun harus yang masih baru bukan yang sudah lecek (jelek).

4.3.1 Budaya Pengeluaran Uang Masyarakat Madura

Orang Madura bermigrasi ke daerah timur Pulau Jawa jauh sebelum perkebunan swasta dibuka oleh pengusaha kulit putih. Akan tetapi, persebaran orang Madura ke daerah eks Keresidenan Besuki setelah perkebunan swasta dibuka. Orang Madura banyak yang datang ke daerah Jember, dan Bondowoso pada umumnya menjadi tenaga kerja atau buruh di perkebunan swasta, seperti perkebunan tembakau, gula, atau kopi. Sejak saat itu, sebagian besar penduduk Jawa Timur berasal dari Madura. Secara demografis, orang Madura menduduki jumlah kedua terbanyak setelah orang Jawa di wilayah eks Keresidenan Besuki

Dalam penulisan sejarah kolonial, Jawa dan Madura ditulis sebagai satu kesatuan wilayah dan kebudayaan, sehingga pemerintah kolonial melaksanakan langkah-langkah administratif dan politis yang sama untuk kedua pulau ini. Padahal antara Jawa dengan Madura mempunyai sifat-sifat khusus.

Bagaimana dengan konsep mereka tentang uang, utang, dan kredit? Tidak terlepas dari konsep budaya tentang hidup bersama yang berkaitan dengan budaya. Mereka menjalankan pola budaya yang sesuai dengan konsep nilai dan moral mereka. Konsepsi kultural yang dibangun oleh masyarakat Madura berkaitan dengan ikatan kekeluargaan yang kuat, *rukun, guyub*, tolong menolong, semuanya memiliki makna sebuah kesatuan untuk hidup bersama. Sebagai sebuah pola ideal, cara hidup semacam ini menjadi acuan atau pedoman yang mereka yakini kebenarannya.

Dalam penelitian terdahulu, uang bagi masyarakat Madura dipahami sebagai alat bayar, alat tukar, dan alat hitung, walaupun tidak semua warga menyadarinya. Penggunaan uang ditujukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, biaya pendidikan, memperbaiki rumah atau aspek ekonomi ekonomi, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya, politik, dan agama.

Bagi masyarakat yang bermatapencaharian berdagang, uang sudah ditujukan untuk hal-hal yang bersifat produktif, uang dianggap sebagai alat

hitung. Mereka dapat merinci keuntungan dan kerugian dari hasil kerja kewirausahaan mereka. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat terutama yang di pedesaan uang masih ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan konsumtif dan sosial budaya.

Aspek budaya yang berkaitan dengan ikatan sosial yang menimbulkan rasa *guyub*, mengakibatkan warga selalu terikat dengan istilah sumbangan bagi berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan kehidupan sebagai pribadi atau warga masyarakat. Sumbangan yang berkaitan dengan acara-acara pribadi selain acara kampung. Sumbangan yang berkaitan dengan acara pribadi antara lain, pernikahan, kelahiran, kematian, dan acara selamatan besar lainnya. Adapun sumbangan bagi acara-acara di kampung atau desa berkaitan dengan bersih desa, dan perayaan acara hari-hari besar lainnya yang dananya harus dipikul bersama, atau tenaga kerja warga diperlukan oleh kampung atau desa.

Sumbangan untuk acara pernikahan, melihat kelahiran seorang bayi, atau pada saat seorang warga meninggal sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakat. Diantara ketiga selamatan tersebut, selamatan pernikahan yang diadakan selalu menyedot biaya besar. Pada saat suatu keluarga melahirkan seorang bayi, maka tetangganya akan berdatangan untuk melihat dan mengucapkan rasa senangnya terhadap kelahiran bayi tersebut, tidak lupa dengan membawa sesuatu berupa barang (pakaian bayi, peralatan bayi, bahkan makanan) atau uang. Apabila ada kematian, maka tetangga akan membawa uang duka atau barang dalam bentuk gula, mie, atau beras, atau juga uang. Besaran uang rata-rata Rp. 15.000,. atau kalau dalam bentuk barang, harganya senilai dengan besaran uang. Kematian merupakan kondisi duka, sehingga penyumbang pada umumnya memberi dengan ikhlas tanpa memikirkan besaran nominalnya, intinya adalah membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Sikap ini akan berbeda dengan acara pernikahan, karena acara pernikahan direncanakan jauh sebelumnya dan melibatkan banyak orang, baik saudara maupun tetangga. Jumlah nominal uang yang dikeluarkan oleh penyumbang cukup besar dibandingkan dengan sumbangan untuk kematian atau kelahiran. Alasannya karena “pada umumnya sumbangan acara pernikahan dicatat oleh yang

mengundang, sehingga nominalnya dapat diketahui oleh pengundang, kalau sedikit ya malu, memberi uang untuk acara pernikahan ya umumnya saja” kata seorang responden.

Apa yang memberatkan orang-orang dalam tradisi atau selamatan pernikahan. Dari beberapa responden didapat keterangan bahwa pernikahan itu dipersiapkan atau direncanakan, sehingga biayanya pun dapat dihitung, baik bagi si pengundang maupun yang diundang. Persiapan acara pernikahan dapat cepat tetapi juga ada juga yang lama, dimulai dari acara lamaran, undangan, sampai resepsi, dan setelah resepsinya. Acara lamaran sudah menyedot pengeluaran banyak dari kedua belah pihak. Pembicaraan dalam lamaran pada umumnya adalah saling memperkenalkan diri, meminta dengan sopan kepada calon pengantin yang akan dilamar, juga menentukan hari baik untuk pernikahan kelak. Undangan yang diberikan pun bervariasi, ada yang berbentuk sabun, rokok, kartu undangan biasa (modern), bahkan undangan dalam bentuk makanan seperti nasi kotak. Bagi warga Madura yang sudah hidup di perkotaan atau di perumahan, bentuk undangan pada umumnya adalah kartu undangan pernikahan yang modern. Berbeda dengan yang di pedesaan bentuk undangan berupa sabun, rokok, atau makanan berupa kotak makanan (wawancara dengan seorang responden, 26 Juni 2015). Perbedaan bentuk undangan akan mempengaruhi uang yang harus diberikan kepada pengundang nantinya. Perbedaan jenis undangan berkaitan dengan perbedaan status sosial dan ekonomi masyarakat, (stratifikasi yang berlaku dalam masyarakat). Rokok dengan merek terkenal untuk orang-orang yang dianggap status sosial dan ekonominya tinggi, rokok dengan merek tidak terlalu terkenal untuk warga yang dikategorikan menengah sabun untuk warga yang secara sosial ekonomi dikategorikan kelas menengah bawah. Tidak ada ketentuan tertulis harus membawa uang berapa besarnya, akan tetapi warga sudah faham besaran nominal yang akan diberikan kepada pengundang berdasarkan jenis undangan. Uniknya besaran nominal yang akan diberikan kepada pengundang sudah diketahui, karena warga sendiri secara aklkamasi menentukan jumlah besaran nominal uang. Besaran nominal uangnya dari waktu ke waktu berbeda, berdasarkan fluktuasi harga barang-barang di pasaran. Uang sumbangan tahun

sekarang akan berbeda dengan dua atau tiga tahun kemudian dengan jenis undangan yang sama.

Orang Madura terkenal karena kereligiusannya, ciri khas Islam melekat dalam budaya berpakaian mereka, seperti kain sarung, songkok, dan baju muslim bagi kaum laki-laki, berkerudung dan pakainan panjang bagi kaum wanitanya. Sumbangan untuk kegiatan keagamaan juga banyak dijalankan oleh masyarakat Madura. Orang Madura merupakan Masyarakat yang religius, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sumbangan untuk keagamaan selalu diusahakan ada. Bentuk sumbangan berupa zakat, sedekah, pembangunan mesjid, serta kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, kegiatan ini dianggap sebagai salah satu bentuk amal ibadah di dunia ini.

Pandangan mereka tentang uang yang berkaitan dengan keagamaan tercermin dalam pembagian zakat, terutama zakat fitrah. Beramal dari sebagian rezekinya merupakan salah satu jalan memenuhi rukun Islam. Seseorang yang dianggap kaya, berusaha untuk menyisihkan kekayaannya untuk berzakat. Zakat kadang tidak anonim, ada juga yang lebih suka dibagikan langsung. Zakat fitrah untuk perempuan kadang berupa baju, untuk laki-laki berupa sarung, baju, atau kopiah. Zakat amal diberikan dalam bentuk uang yang dimasukkan dalam amplop tertutup. Jumlah zakat kadang mencapai puluhan jutaan rupiah. Zakat fitrah di antar kerumah-rumah orang yang dianggap berhak menerimanya. Kadang juga zakat langsung diberikan kepada yang berhak menerima. Menurut beberapa informan, penerima zakat tidak semuanya termasuk ke dalam golongan tidak mampu, pada kenyataannya sering juga seseorang yang dianggap penting oleh pemberi zakat, maka semakin besar nominalnya, tidak jarang seorang kiayi akan menerima lebih besar dibandingkan dengan yang yang lainnya.

Rukun Islam mengharuskan orang untuk membagikan 2,5% dari nilai barang yang dimilikinya lebih dari satu tahun sebagai zakat, sehingga orang kaya yang beriman berusaha untuk menyisihkan dan membagikan keuntungan dari usahanya. Apabila tidak melakukannya, atau seseorang yang dianggap kaya tetapi belum melakukan hal ini, maka ia akan terkucilkan, atau dianggap tidak soleh. Selain zakat juga, orang Madura mengenal sedekah. Sedekah ini diberikan secara

sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, entah itu dalam bentuk uang atau makanan. Bagi para pedagang besar yang bergelar haji, pada umumnya banyak menyumbangkan uangnya untuk kegiatan keagamaan. Hal ini menggambarkan makna agama untuk mempertahankan hubungan yang khususnya mempunyai makna sosial sekaligus ekonomi.

Bagi orang Madura (pada dasarnya orang Indonesia), naik haji mempunyai makna sosial. Di samping telah menunaikan rukun Islam yang kelima, orang yang telah naik haji akan dipanggil Pak Kaji, dan prestisenya naik. Karena itu, tidak heran bila tujuan hidup orang Madura adalah ibadah haji ke Mekkah.

Kehidupan orang Madura sehari-hari tidak lepas dengan dimensi agama, Selain sholat lima waktu, mereka pun melakukan peringatan hari penting Islam, misalnya selama Asyuro mereka membuat jenang suro, selama bulan safar mereka membuat jenang safar, pada saat Mauludan mereka memperingatinya dengan selamatan Mauludan

Dapat dikatakan, di pedesaan, selamatan merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, terutama dalam bulan-bulan yang cocok untuk melangsungkan perkawinan, memperingati kelahiran atau kematian. Selamatan diadakan oleh perorangan, atau bahkan desa, seperti bersih desa, kadang acara selamatan diadakan untuk mengucapkan syukur atas keberhasilan seseorang dalam usaha, pendidikan, membangun rumah, dan sebagainya. Acara-acara selamatan ini sudah barang tentu memerlukan banyak biaya. Kebutuhan akan biaya inilah, yang kadang-kadang kurang rasional, maksudnya tidak terlalu memperhitungkan besaran pendapatan dan pengeluaran. Kadang mereka berhutang terlebih dahulu kepada tetangga yang dianggap punya uang, atau kepada rentenir. Dalam konsepnya yang penting ada uang untuk mengadakan acara-acara selamatan, supaya tidak malu nantinya kalau tidak dapat melaksanakan acara selamatan.

Memang dalam acara selamatan ada yang merasa sebagai hal yang *guyup*, toleransi, dan gotong royong. Dalam ilmu sosial hal ini dinamakan sebagai pertukaran timbal balik atau resiprositas. Resiprositas ini merupakan abstraksi dari proses ekonomi yang kongkrit yang dalam kenyataannya selalu mengandung

unsur-unsur yang tercampur tidak murni. Pada umumnya berbeda dalam bentuk pemberian, yaitu yang satu berupa tenaga kerja, yang satunya berupa materi (uang).

Timbal balik biasa terjadi pada pertukaran kebutuhan yang tidak terlalu urgen seperti pinjam meminjam barang antara tetangga. Timbal balik seimbang, seperti dalam konsep *onjengan*, dan *parloh*, adapun timbal balik yang tidak seimbang adalah ikatan antara orang tidak punya dengan orang kaya di mana pemberian dari pihak yang kaya pada dasarnya ada unsur politis sepihak.

Uang dipahami sebagai alat tukar dan alat bayar utang piutang yang cepat dan mudah, baik secara tunai maupun secara angsuran. Masyarakat beranggapan bahwa uang punya peranan penting untuk melangsungkan kehidupan sosial ekonominya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah memahami bahwa uang sebagai instrumen ekonomi, yaitu sebagai alat tukar dan alat bayar.

Apabila dikaji lebih jauh, bagi masyarakat Madura, uang bukan hanya sekedar instrumen ekonomi yang secara pragmatis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, perlu juga dipahami tentang pengertian kebutuhan hidup sehari-hari, karena kebutuhan hidup itu bukan saja untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan, melainkan untuk juga kebutuhan sosial budaya, agama, politik, bahkan juga psikologis.

4.3.2 Budaya Utang Masyarakat Madura

Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan masyarakat tidak terlepas dari permasalahan utang piutang, karena diantara mereka ada yang membutuhkan uang dan ada yang merasa dibutuhkan, Seseorang melakukan utang karena terpaksa utang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan dasar (primer), dan juga ada yang berusaha berhutang untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yaitu untuk membeli benda-benda yang bukan merupakan kebutuhan pokok, seperti perabot rumah tangga. Seseorang berusaha untuk meminjam kepada orang-orang dianggap mampu memberikan pinjaman. Bahkan ada diantara mereka yang merasa nyaman dengan berbagai utangnya, walaupun secara finansial sudah terlilit dengan berbagai utang sekunder.

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa utang terjadi karena pemasukan dan pengeluaran tidak berimbang. Utang merupakan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk modal usaha. Utang berkaitan dengan bentuk pinjaman, bagaimana budaya orang Madura mengkaitkan perilaku ekonomi dan sosial sebagai utang.

Utang dimaknai dalam dua pengertian yaitu utang budi dan utang finansial. Utang budi berkaitan dengan moral, tenaga, atau uang yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Utang finansial berkaitan dengan utang materi berupa uang atau benda lainnya. Utang ini terjadi karena adanya pergeseran pola budaya ke arah pola konsumenisme. Interaksi masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan mendorong adanya perubahan hidup dan pola konsumtif. Simbol kota seperti HP, rumah permanen, peralatan modern dan canggih menjadi acuan warga pedesaan. Permasalahannya adalah tidak didukung oleh sumber daya ekonomi sehingga sangat bergantung kepada dana utang. Mekanisme utang piutang inilah yang banyak menjebak masyarakat dalam lilitan utang.

Adapun utang budi berkaitan dengan lembaga sosial yang sudah menjadi tradisi dan masih berlangsung sampai saat ini di beberapa desa di eks Keresidenan Besuki. Modal budaya sosial masyarakat Madura yang berkaitan dengan prinsip timbal balik adalah *mabali dada* (mengembalikan kebaikan), orang Madura harus mengembalikan kebaikan siapa saja yang pernah menolong, baik keluarga besarnya maupun pribadinya. Dengan demikian orang Madura berusaha untuk mengembalikan materi atau barang yang pernah diberikan seseorang pada saat ia membutuhkan pertolongan. Ada keunikan dalam tradisi orang Madura, apabila sumbangan yang pernah diberikan kepada tetangga yang membutuhkan seperti dalam acara selamatan atau hajatan tidak sesuai, maka ia dapat menagih kekurangannya. Apabila tidak dibayarkan, maka dapat saja terjadi *carok*. Misalnya, seseorang memberi seekor sapi kepada tetangga yang mengadakan hajatan, maka suatu pada saat ia mengadakan hajatan, maka tetangga yang pernah disumbang seekor sapi harus mengembalikan seekor sapi pula. Jadi sumbangan yang berkaitan dengan sosial ada hitungan ekonomisnya, dengan kata lain bentuk menabung. Hal yang perlu diteliti lebih lanjut di mana konsep budaya tidak

terlepas dengan faktor ekonomi. Sumbangan yang diberikan dalam pesta hajatan dianggap hutang oleh si pemberi sumbangan yang pada suatu saat harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, bahkan harus ada lebihnya. Pada masyarakat Madura di daerah tertentu sumbangan akan diumumkan di hadapan para hadirin, sehingga hadirin merupakan pengontrol moral dari masyarakat termasuk dalam sumbang menyumbang yang pada akhirnya sebagai ikatan hutang piutang tak tertulis.

Bagaimana apabila seseorang tidak mengembalikan sumbangan sesuai dengan jumlah yang pernah disumbangkan kepada yang pernah menyumbang. Sangsi sosial berlaku, dan juga akan menimbulkan *carok* di antara pemberi sumbangan. *Carok* merupakan jawaban atas rasa ketidakpuasaan seseorang terhadap pengembalian sumbangan yang dianggapnya tidak berimbang. Asal usul sejarah *carok*, belum begitu jelas, akan tetapi, secara budaya *carok* dimaknai sebagai pemertahanan harga diri. Penyebab *carok* pada umumnya sebagai rasa terhina, yaitu menganggu istri, ingkar janji, masalah utang-piutang, dan sebagainya. Pepatah Madura mengatakan lebih baik “berputih tulang daripada berputih mata”, yang berarti lebih baik mati terhormat daripada menanggung penghinaan. Sampai sekarang budaya ini masih berlangsung, walaupun sudah tidak terlalu dominan, karena *carok* berhubungan dengan politik, sosial, dan juga ekonomi.

Hal ini terjadi di pesisir utara pantai di Desa Kilensari yang masih kental budaya Maduranya. Sementara di Desa Pujer Baru Bondowoso, hal ini sudah tidak berlaku kembali. Apa yang diberikan kepada tetangga atau keluarga merupakan hal wajar, apabila nanti tidak dikembalikan penuh tidak menjadi masalah, hanya menjadi *rasan-rasan* (pembicaraan) di antara tetangga dan tidak ada sangsi sosialnya. Seseorang membebi kepada orang lain harus didasari dengan rasa ikhlas, bukan sebagai investasi atau tabungan jangka panjang yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau lebih banyak.

Bentuk lain dari utang yang berkaitan dengan tradisi orang Madura di Pedesaan adalah *parloh*. Tradisi ini berupa bentuk pemberian makanan kepada tetangga yang pernah disumbang olehnya pada saat tetangga tersebut mengundang terlebih dahulu. Pemberian kiriman dalam bentuk makanan, untuk mengingatkan

si penerima sumbangan, agar pada hari selamat (pada umumnya pesta pernikahan) memberikan sumbangan paling tidak dengan nominal yang sama. Pengiriman makanan ini dilakukan sekitar satu minggu sebelum pesta diadakan. *Parloh* ini masih berlangsung sampai sekarang di desa-desa yang masih kental dengan ikatan timbal baliknya. *Parloh* merupakan suatu mekanisme warga yang mengikat, apabila seseorang sudah melakukan *parloh* kepada tetangga yang sedang hajatan, maka nilai yang kira-kira setara dengan diberikan kepadanya akan dikembalikan pada saat ia mengadakan hajatan. *Parloh* ini menguatkan ikatan struktur masyarakat, dan menjadi rangsangan bagi mekanisme berbagi. Apabila yang diberi *parloh* tidak mengacuhkannya, maka ia akan mengalami sanksi sosial, bahkan dapat menjadi musuh karena akan putus hubungan persaudaraan.

Pada saat tetangga mengadakan acara hajatan (pesta pernikahan), maka terjadi tradisi yang dinamakan *otang lakoh*, yaitu hutang kerja, kalau dalam acara pernikahan undangan untuk kerja dinamakan *nyoddul dudul*, yang berarti masak dodol. Dalam memasak dodol diperlukan tenaga yang banyak untuk *menodok* (mengaduk) dodol sebagai salah satu hidangan khas masyarakat Madura. Jadi *otang lakoh* berkaitan dengan undangan kerja atau jasa kerja.

Ada suatu budaya yang masih berlaku di pedesaan saat mengundang tetangga, undangan menandakan status sosial dan ekonomi menurut para pengundangnya. Perbedaan status sosial dan ekonomi akan tampak dari jenis undangan yang diberikan oleh si pengundang. Undangan dengan nominal yang berbeda disimbolkan oleh rokok dan sabun. Jenis undangan yang disertai rokok yaitu, rokok jisamsu, rokok surya, dan rokok grendel (merek lokal), sedangkan sabun pada umumnya bermerek give (satu macam).

Seseorang yang diundang harus memberi sumbangan kepada si pengundang sesuai dengan jenis undangannya. Nominal yang diberikan setidaknya sesuai dengan harga yang sudah disepakati secara masal, undangan yang disertai dengan rokok Jisamsu nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan rokok surya, ataupun grendel, adapun sabun nominalnya lebih kecil lagi. Pada umumnya undangan yang disertai rokok Jisamsu nominalnya sekitar Rp.35.000,-Rp. 50.000,., Rokok surya sekitar Rp 25.000-Rp 30.000,., adapun

sabun sekitar Rp. 20.000,. Di daerah tertentu ada yang dikirim daging sapi mentah antara setengah sampai satu kilogram, si penerima undangan daging harus memberikan sumbangan melebihi harga daging pada waktu itu. Sistem undangan dengan berbagai benda yang mengandung arti ini dinamakan sistem *tonjokkan*.

Tonjokan dalam bahasa Madura, adalah semacam undangan disertai simbol-simbol yang berkaitan dengan status sosial seseorang. Pemberian undangan yang berbeda ini menandakan berapa uang yang harus diberikan kepada sipengundang, nominal uang yang disumbangkan minimal harus sama atau diberi kelebihan sedikit. Akan tetapi, pada kenyataannya, orang yang dianggap mampu secara sosial dan ekonomi akan mengembalikannya dengan nilai yang lebih besar dari simbol undangan, karena tidak mau menjadi bahan pergunjangan yang bersifat negatif dari pengundang atau tetangga dikemudian hari.

Di kota besar atau daerah perumahan sudah tidak terlalu terikat dengan simbol-simbol undangan, karena pengundang akan memberikan surat undangan modern yang sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, beberapa responden mengatakan bahwa status sosial si pengundang pun menjadi tolok ukur. Selain itu, tempat resepsi undangan mempengaruhi besar kecilnya nilai atau nominal yang diberikan kepada si pengundang, apabila resepsi dilaksanakan di rumah maka uang yang diberikan berkisar Rp. 25.000,. sampai Rp. 50.000,. apabila di gedung nominal uang antara Rp.50.000 sampai Rp.100.000,.. kecuali untuk keluarga sendiri nominalnya juga berbeda.

Di perkotaan sifat undangan pernikahan pada umumnya sama, yaitu dalam bentuk kartu undangan yang sudah modern, sehingga tidak tampak adanya perbedaan dalam jumlah nominal sumbangan. Sudah terjadi pergeseran stratifikasi, atau karena adanya kaum urban yang sudah tidak terlalu terikat dengan ikatan sosial budaya yang kompleks. Rasa guyub dan gotong royong tetap ada, akan tetapi tidak terlalu mengikat. Ikatan persaudaraan tetap kuat, hanya diantara saudara atau ikatan keluarga. Para tetangga tidak terlalu dilibatkan, karena pada umumnya seremonial pernikahan dilaksanakan di gedung, serta makanan sudah dipesan di catering. Hal ini mengubah konsep guyub atau gotong royong dalam

persiapan acara pernikahan. Pergeseran ini mengurangi aktivitas yang padat bagi tetangga-tetangganya.

Ada juga tradisi yang berkaitan dengan pengertian utang, yaitu pada saat mau mendirikan rumah. Ada tradisi yang dinamakan *onjengan* atau kunjungan, yaitu permintaan tolong seseorang kepada tetangga (ahli bangunan) untuk membongkar atau membangun rumahnya. *Jeng ajeung*, di mana tukang tidak dibayar. Siapa yang mendapat *onjengan* dan *jeng anjeung*, biasanya mereka selalu memenuhi undangan tersebut. Mereka wajib memenuhi undangan pada hari yang ditentukan dan membantu tetangga yang mengundang, mereka menyelesaikan tugasnya hanya untuk satu hari kerja saja, tanpa diberi upah. Sesibuk apapun seseorang yang mendapat *onjengan* berusaha untuk meluang waktu dalam satu hari itu. Apabila tidak datang akan dirasakan oleh pengundang dan masyarakat. Untuk menghindari perasaan tidak enak, mereka selalu berusaha untuk memenuhi undangan tersebut. Hal ini terjadi karena pengundang merasa pernah membantu orang yang diundang tersebut. Biasanya dalam membuat atau membongkar rumah, kelompok bapa-bapa menyumbangkan tenaganya, sedangkan kelompok ibu-ibu menyumbangkan tenaga serta bahan makanan untuk dimasak dan dimakan bersama. *Ojengan* ini hanya berlangsung sehari saja, pada saat membongkar atau membangun rumah. *Ojengan* menjadi suatu mekanisme yang populer untuk mendirikan rumah antara yang satu dengan yang lainnya. *Ojengan* ini merupakan pemahaman bantu membantu antar warga desa, sumbangan antar tetangga, atau bentuk tabungan, karena kadang-kadang orang yang sedang membangun rumah meminjam terlebih dahulu material tetangga atau familinya, kemudian nanti dikembalikan pada saat orang yang dipijaminya membangun rumah di kemudian hari.

Utang menjadi perhatian yang urgen, terutama apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Salah seorang wakil dari keluarga yang meninggal, sebelum jenazah disemayamkan, maka ia akan mengungkapkan di hadapan pelayat (orang-orang yang datang), apabila ada yang merasa diutang oleh orang yang meninggal diharap untuk menghubungi keluarga agar utangnya dapat dibayar. Maksudnya agar perjalanan arwahnya tidak tersendat karena masih memiliki utang di

dunia. Secara religi pun utang menjadi perhatian masyarakat Madura. Pengertian ini terjadi secara umum di dalam masyarakat yang religius, karena utang pun harus dilunasi, sebelum jenazah dikuburkan pihak keluarga akan menyatakan siapa yang merasa meminjami uang terhadap almarhum atau almarhumah, maka diharapkan berhubungan dengan keluarga agar utangnya dapat dilunasi atau dibicarakan lebih lanjut. Ada suatu kepercayaan bahwa orang yang tidak mampu melunasi hutang sampai meninggal dunia akan mendapat macam-macam ancaman dari Allah.

Bangsa Indonesia kuat dengan religinya, sehingga permasalahan utang sudah menjadi bahan pembicaraan dan bahasan dari para ahli agama juga. Ahli agama pun berusaha untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam berutang. Dewasa ini bukan hanya orang-orang yang awam dalam agama yang terlibat hutang piutang secara permanen, melainkan juga yang rajin beribadah, orang yang berilmu, maupun orang yang sudah kaya terlibat utang. Salah satu tulisan dalam surat kabar yang menghibau agar masyarakat tidak terlalu terlibat dalam utang piutang yang dapat menjerumuskan masyarakat dalam lilitan utang antara lain dari Nafis (Jawa Pos, 2014), bahwa orang yang mempunyai utang sampai meninggal belum lunas maka ia akan:

1. Dosanya tidak akan diampuni sampai ia melunasi utangnya
2. Orang yang mempunyai utang ketika meninggal dunia ditahan untuk tidak masuk surga, meskipun ia memiliki banyak amalan sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutangnya.
3. Orang yang mempunyai utang selalu merasa bingung dan hilang harga dirinya terutama apabila tiba pembayaran dan tidak mempunyai uang untuk melunasinya.

Himbauannya adalah jangan berutang, apabila terpaksa maka harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan agama. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari diri dari belitan utang yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, yaitu,:

1. Jangan berutang kecuali terpaksa.
2. Bertaqwalah kepada Allah sebelum dan ketika berhutang.

3. Jangan tertipu oleh promosi dan iklan bank.
4. Menghindari kartu kredit
5. Hindari membeli secara kredit.
6. Jangan termakan oleh paham yang menyesatkan tentang tawaran kredit dan kartu kredit.
7. Muliakanlah tamu tanpa berlebihan
8. Jangan membebani diri melebihi kemampuan
9. Mempertimbangkan untung dan rugi sebelum berusaha
10. Mempertimbangkan untung rugi sebelum berusaha
11. Berlindung kepada Allah dari tidak bisa membayar utang

Masalah utang piutang pun menjadi perhatian, bukan saja pemerintah tetapi para ahli agama yang memahami betapa beratnya suatu utang yang tidak dapat dibayar lunas oleh para peminjamnya. Himbuan ini bermaksud agar masyarakat berhati-hati dalam meminjam uang, mengembalikan kepada kehidupan yang berkecukupan bukan konsumtif agar pengeluaran menjadi seimbang dengan pemasukan. Ayat suci bukan untuk menakuti orang untuk berutang, akan tetapi mengikatkan manusia tentang proses dan dampak utang piutang yang harus disadari oleh masyarakat. Imbauan ini sangat relevan bagi masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan uang terutama uang yang berasal dari utang. Selain tulisan dalam media juga kadang disajikan himbuan tidak berutang secara gegabah pada saat pengajian-pengajian, terutama pengajian ibu-ibu yang rutin diadakan dalam kelompok pengajian.

Dalam hal ini utang ada dua jenis, ada utang yang berkaitan dengan finansial ada juga yang berkaitan dengan utang budi. Seseorang yang pernah ditolong oleh orang lain tanpa pamrih menimbulkan rasa utang, tapi dalam konsep utang budi.

Pengertian utang yang berkaitan dengan uang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk kebutuhan gaya hidup konsumtif. Di desa Kilensari dewasa ini banyak yang berubah terutama gaya hidup.

Di desa nelayan, dapat diperkirakan bahwa nelayan kecil sangat tergantung kepada musim. Pada musim paceklik atau tidak melaut, maka nelayan kecil ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kepada seorang juragan. Caranya mereka mengambil uang terlebih dahulu, setelah melaut hasil tangkapan ikannya tidak boleh dijual kepada orang lain tetapi harus kepada pemberi modal awal dengan harga yang sudah ditentukan. Seorang informan memberikan keterangan bahwa ada seorang pedagang ikan keliling meminjam uang sebagai modal kepada para pemilik modal (rentenir) di sekitar tempat tinggalnya sebesar Rp. 100.000,- pagi hari untuk membeli ikan. Setelah berdagang sekitar pukul 12.00 siang atau lebih dagangannya laku dan terjual semua, maka ia akan mendapat uang sekitar Rp. 150.000,-, maka sore hari itu juga uang pinjaman dikembalikan kepada pemilik modal sebesar Rp. 125.000,- jadi dapat dibayangkan bunga yang diterapkan dalam satu hari sekitar 25%. Akan tetapi menurut pedagang tersebut ia sudah diuntungkan oleh pemberi pinjaman, karena ia dapat berjualan seandainya tidak ada modal entah apa yang akan dimakannya.

Ada juga yang meminjam uang kepada seorang bando (juragan), misalnya seseorang meminjam uang sebesar Rp.100.000,-, ia harus mencicil tiap hari sebesar Rp. 11.000,- selama sepuluh hari. Jadi ia harus membayar bunga Rp. 1.000,-. Dalam sepuluh hari jumlah uang yang dikembalikan menjadi Rp.110.000,- jadi ia membayar bunga sebesar Rp. 10.000,- atau 10% untuk pinjaman 10 hari atau 30% untuk pinjaman 30 hari atau satu bulan, padahal bunga bank umum berkisar 18-20 persen pertahun.

Persepsi para nelayan terhadap rentenir tidak sama dengan persepsi orang dari luar wilayahnya dan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa para rentenir dapat memberikan pinjaman tanpa berbelit-belit dalam jangka waktu yang relatif singkat. Mereka sangat membutuhkan uang kontan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka harus mendapatkan uang kontan tersebut secepatnya tanpa memikirkan bagaimana mengembalikan uang tersebut, apalagi memikirkan jumlah bunga yang harus dibayarkan. Hal ini terjadi karena para nelayan pada umumnya pendidikannya rendah, sehingga taraf berpikirnya pun sangat sederhana. Mereka jarang memahami bunga yang harus ditanggung sangat besar,

Pinjam uang terhadap rentenir terutama pada saat musim angin barat, karena anginnya kencang, mereka tidak dapat melaut atau menangkap ikan. Pada saat itu, para nelayan memasuki masa *paceklik* (masa sulit karena tidak ada penghasilan). Pada musim paceklik mereka tidak dapat beraktivitas mencari ikan di laut, padahal kebutuhan hidup sehari-hari harus tetap berjalan. Jalan keluar para nelayan pinjam dengan bunga tinggi. Pinjama kepada rentenir dirasakan menjadi beban yang berat, akan tetapi mereka belum dapat memecahkan persoalannya karena ketidakberdayaan secara skil, pendidikan rendah, dan kemiskinan yang membelenggu mereka. Pinjam kepada rentenir memang berat pada saat harus membayar pinjamannya, akan tetapi ada beberapa responden yang menganggap rentenir sebagai penolong, masih untung ada yang mau meminjami, musim paceklik seperti ini hanya uang utangan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian para nelayan pun sulit untuk melepaskan diri dengan para rentenir.

Hal ini terjadi di hampir setiap desa nelayan seperti yang diberitakan harian Kompas (Senin, 4 Maret, 2015:20), terjadi di desa Nelayan Karangsong, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Seorang nelayan meminjam uang kepada *tengkulak* untuk modal melaut. Ia meminjam uang sebesar Rp.200.000,.. Hasil tangkapannya harus dijual kepada *tengkulak* yang meminjamkan uang dengan harga yang lebih rendah dari harga umum di pasaran. Rajungan yang harganya Rp. 45.000 per kilogramnya hanya dihargai Rp. 40.000,. per kilogram oleh *tengkulak*. Dengan demikian, ia harus membayar bunga Rp. 5.000 per kilogramnya atau 11.1 % per kilogram per hari, sedangkan di bank umum untuk usaha mikro hanya berkisar 18-20 persen per tahun.

Di desa nelayan ada yang dinamakan juragan, pemilik kapal, dan *pengambe* yang menjalankan kapal untuk menangkap ikan, serta para nelayan yang bekerja untuk mendapatkan ikan. Juga ada *tengkulak* atau pedagang, *tengkulak* ada yang berperan sebagai pedagang saja, tetapi ada juga yang berperan sebagai pemberi pinjaman sekaligus. Modal para *tengkulak* yang merangkap sebagai rentenir. Modal ada yang berasal dari seseorang yang tinggal di daerah lain sebagai tauke atau pemilik modal yang lebih banyak, ada juga yang memiliki

modal pribadi. *Tengkulak* ini menerima uang sebagai modal dengan bunga tinggi dan berdasarkan kepercayaan, serta dianggap prosedurnya tidak sulit. Selama musim ikan, *tengkulak* ini berperan membeli hasil tangkapan ikan yang kadang-kadang bekerja sama dengan juragan dan *pengambe*. Kerja sama ini dalam ikatan pinjam meminjam modal untuk melaut mencari hasil tangkapan ikan.

Tidak mudah untuk menjadi *pengambe*, karena seorang *pengambe* harus memiliki keahlian melaut dan menentukan tempat yang banyak ikannya. *Pengambe* bergantung kepada juragan sebagai pemilik modal. Diantara ketiganya biasanya ada hubungan yang berkaitan dengan utang piutang. *Pengambe* berutang dahulu kepada juragan, kadang juragan berutang kepada *tengkulak*. Dengan menciptakan hutang, *pengambe* bergantung kepada juragan, juragan bergantung kepada *tengkulak*, *tengkulak* bergantung kepada *taoke*. *Tengkulak* bisa mengikat *pengambe* dan pedagang kecil dengan utangnya, sehingga mereka bergantung kepadanya. Memutuskan hubungan ikatan utang-piutang antara *pengambe* atau pedagang kecil dengan *tengkulak* berakibat tidak akan mendapat utangan baru, yang berarti juga tidak dapat mencari nafkah karena tidak ada modal untuk melaut. Ikatan utang-piutang sedemikian kuat sehingga para pedagang dan nelayan kecil tidak pernah dapat terlepas dari jeratan utang dan akibatnya secara ekonomi tidak dapat mandiri.

Ada juga informasi menarik dari seorang informan, bahwa untuk menjadi seorang rentenir tidak mudah, selain harus memiliki kekuatan modal, keberanian untuk menagih, disiplin, juga harus mempunyai orang-orang yang dapat memberikan kekuatan yang bersifat spiritual. Masyarakat mempercayai suatu pemikiran bahwa untuk menjadi rentenir pun harus memiliki kekuatan supernatural (meminta tolong kepada seorang dukun yang dipercayainya dapat memberikan kekebalan, keberanian, serta kekayaan) agar banyak nasabahnya.

Hal inilah yang menjadi perhatian dari beberapa instansi perguruan tinggi serta pemerintah daerah untuk memutus mata rantai utang piutang abadi antara nelayan dan pedagang kecil dari *tengkulak* yang merangkap pula sebagai rentenir. Seorang rentenir pun harus melindungi modalnya. Utang piutang hanya bermodalkan kepercayaan, tidak ada anggunan yang dapat memberi jaminan bagi

kerugian seorang rentenir apabila peminjam *mengemplang* (tidak membayar). Hal inilah yang mengakibatkan seorang rentenir melindungi modalnya dengan bunga yang tinggi. Apabila tidak dikenakan bunga tinggi, maka seorang rentenir tidak dapat memutarakan uangnya dengan lancar, bahkan modalnya akan habis, bahkan ia akan mengalami kerugian. Seorang rentenir mengatakan ia juga harus membayar bunga kepada pemilik modal, karena modalnya berasal dari seseorang yang tidak tinggal di desanya. Pada umumnya, pemilik modal yang kuat tinggal di kota. Bunga pinjaman modal dari pihak lain menjadi perhatian para rentenir, karena apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman uang dari pemilik modal awal,, maka ia pun akan terperosok dalam lingkaran hutang piutang yang mungkin saja membangkrutkan usahanya. Untuk itulah, seorang rentenir harus dapat membaca situasi, mempercayai nasabah, memberikan utang secara mudah, dan ada pula yang konon katanya meminta berkah kepada orang pintar agar usahanya dapat berjalan lancar.

Di sisi lain masyarakat desa, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang berempati kepada masyarakat kecil mengatakan, bahwa nelayan kecil tidak dapat mengakses pinjaman ke bank karena tidak memiliki agunan, bahkan nelayan usahanya sudah besar pun kadang-kadang kesulitan meminjam ke bank karena harus menyertakan agunan berupa sertifikat. Jadi nelayan kecil lebih mengandalkan *tengkulak* daripada meminjam ke bank, walaupun ia menyadari bahwa uang yang harus dikembalikan menjadi sangat besar bunganya. Bahkan, sebagian besar dari nelayan kecil tidak pernah memahami besar kecil bunga yang diterapkan kepada mereka karena faktor pendidikan yang rendah yang tidak dapat menjangkau hitungan bunga secara realistis.

Demikian juga, di desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani dengan lahan kecil. Petani bergantung pada musim, seandainya musim tidak bersahabat, maka produktivitasnya menurun dan dianggap *paceklik* oleh mereka. Masa *paceklik* ini merupakan masa paling rawan, di mana mereka berusaha meminjam uang kepadarentenir untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.. Pinjaman tidak selalu untuk keperluan konsumtif, tetapi juga untuk keperluan

produktif. Pada umumnya mereka sebagai petani kecil tidak dapat mengakses pinjaman kepada lembaga perbankan formal. Mereka meminjam modal atau uang kepada rentenir. Menurut salah seorang informan, para rentenir di desanya bukan pemilik modal, akan tetapi modalnya berasal dari seorang tauke di luar desanya, sehingga masyarakat tidak pernah tahu tauke tersebut. Rentenir yang menjalankan profesinya di desa, menerapkan bunga yang cukup tinggi, cicilan dapat dilakukan harian, mingguan, dua mingguan, satu bulanan, dua bulanan, atau musiman (masa panen). Pinjaman dalam jumlah kecil pada umumnya untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan pinjaman dalam jumlah besar untuk modal usaha atau modal bertanam padi. Pinjaman untuk konsumsi, dicicil sesuai dengan perjanjian, adapun pinjaman untuk modal produksi dibayar permusim panen. Adakalanya pinjaman tidak dapat dikembalikan, sehingga utang semakin bertumpuk, akibatnya hasil panen harus diberikan kepada si pemberi pinjaman dengan harga yang sudah ditentukan. Di sisi lain, ada juga petani yang membutuhkan uang kontran secara tiba-tiba tetapi tidak punya tabungan, sehingga ia akan meminjam kepada *tengkulak* dengan perjanjian bahwa hasil panennya akan diberikan kepadanya, hal seperti ini dinamakan *ijon*, menjual produksi sebelum masa panen atau masih hijau. Dengan sisten *ijon*, petani tidak punya hak untuk memanen produksinya di kemudian hari.

Bagi *tengkulak*, sistem *ijon* merupakan cara untuk berspekulasi mengenai harga, karena ia harus menaksir harga serta produknya sebelum masa panen. Apabila panennya bagus dan harga pasaran tinggi, maka ia akan mendapat keuntungan yang sangat tinggi, akan tetapi apabila hasil panen sedikit atau harga jatuh, ia tidak akan mendapat keuntungan bahkan kerugian yang harus ditanggungnya. Jadi, seorang *tengkulak* yang berkecimpung diperijonan pun harus memiliki keahlian menaksir hasil panen dan meramalkan musim agar hasil panennya tidak gagal. Petani yang telah diberi uang muka pada dasarnya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari hasil panennya, karena hasil akhir produksinya akan dinikmati oleh para peminjon yang rata-rata merangkap sebagai *tengkulak* di desanya. *Tengkulak*lah yang memiliki akses pemasaran serta harga-harga di pasaran, sedangkan para petani pada umumnya tidak memiliki akses secara langsung untuk memasarkan hasil produksinya. Kelemahan inilah yang

pada akhirnya melanggengkan hubungan antara petani dengan tengkulak yang juga merangkap sebagai *rentenir*, karena masing-masing mempunyai ketergantungan yang kuat. Petani bergantung kepada *tengkulak* karena tidak memiliki akses penjualan di pasar, sedangkan *tengkulak* berusaha tetap menyediakan modal dan kemudahan dalam peminjaman agar nasabahnya tidak berpaling kepada *tengkulak* yang lainnya. Ikatan patron klien di desa mempengaruhi hubungan antara *tengkulak* dengan petani, walaupun posisi petani dan *tengkulak* tidak seimbang dalam pinjam meminjam, karena posisi petani selalu dalam kondisi lebih lemah dibandingkan dengan *tengkulak*.

Pada umumnya para *rentenir* ini merangkap juga sebagai *tengkulak*. Bunga diterapkan tidak sama bergantung kepada jangka waktu peminjaman, pinjaman ada yang jangka waktunya pendek atau panjang. Misalnya seseorang yang meminjam uang sebesar Rp. 100.000, ada yang mengasur harian ada juga yang dicicil mingguan. Apabila peminjam membayar harian, maka ia akan membayar Rp.11.000 per hari selama 10 hari, sehingga selama 10 hari uang yang dikembalikan kepada pemodal sebesar Rp. 110.000. Apabila mingguan ia harus mengangsur sebesar Rp. 15.000, sehingga dalam 10 minggu uang yang dikembalikan menjadi Rp 150.000, Apabila pada waktunya tidak dapat membayar pokok utangnya, maka bunganya saja yang dibayarkan. Peminjam menganggap bunga harian sejumlah Rp. 1000, Tiap hari itu ringan, mereka tidak menjumlahkannya selama sepuluh hari menjadi Rp.10.000,, pola pikir masyarakat yang belum menghitung besar bunga secara realitis.

Sebagian besar masyarakat Madura terutama yang tinggal di pedesaan menganggap uang sebagai alat tukar dan alat bayar, hanya sebagian kecil, terutama para pedagang yang termasuk pedagang besar sudah memaknai uang sebagai alat ukur. Sehingga kesenjangan pemahaman uang ini sering merugikan salah satu pihak dalam utang piutang, karena utang piutang masih berlangsung secara tradisional.

Desa penelitian seperti Kilensari merupakan desa Nelayan yang sudah cukup maju karena dekat dengan kota, terjadi interaksi budaya desa dengan kota. Hal ini mendorong perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat desa.

Simbol kota seperti hand phone, rumah permanen gaya Eropa menjadi acuan warga desa. Di sisi lain, warga desa masih terikat kuat dengan ikatan budaya. Ikatan utang piutang yang hanya menguntungkan sepihak, terutama pemilik modal yang dikategorikan rentenir, disebabkan karena masyarakat sekitarnya pun baik secara ekonomi maupun pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan, mengakibatkan daya pikir dan daya nalar tidak berkembang, sehingga mudah untuk menerima bantuan keuangan tanpa menghitung kerugian yang akan ditanggungnya.

Dalam hal ini utang piutang yang berkaitan dengan budaya berdampak pada moralitas dan hubungan antar warga. Ilmu sosial mengkategorikan sebagai rasa timbal balik atau resiprositas (Blau dalam Paloma,1984:84). Blau berpendapat bahwa tidak semua transaksi sosial berdasarkan pertukaran sosial seimbang. Hubungan–hubungan antar pribadi dapat bersifat timbal balik atau sepihak. Dalam hal ini terjadi hubungan yang simetris, dimana semua anggota menerima ganjaran sesuai dengan apa yang diberikannya, hubungan yang seperti ini dinamakan pertukaran (utang Budi).. Pertukaran timbal balik yang berkaitan dengan hubungan sosial, yaitu:

1. Timbal balik biasa, tidak ada ikatan yang berkaitan dengan urusan utang piutang, biasanya pertukaran ini terjadi dalam keluarga.
2. Timbal balik yang seimbang. Pemberian seseorang yang diperhitungkan dalam pengembalian selanjutnya. Jumlah yang diberikan nanti harus sesuai dengan jumlah yang akan diterima di kemudian hari.
3. Timbal balik yang tidak seimbang, di mana hubungan antara pemberi dan penerima kedudukannya tidak seimbang, sehingga secara politis, kedudukan seseorang yang rendah menerimanya lebih sedikit dari sipenerima sebelumnya.

4.3.3 Pergeseran Sistem Kredit Di Desa Kilensari

Kredit dipahami oleh masyarakat Madura sebagai bentuk pinjaman uang atau barang, pengembalian pinjaman dilakukan melalui sistem angsuran beserta besaran bunganya. Bagi masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, serta pengusaha kecil-kecilan, aktivitas perkreditan dilakukan melalui kredit tradisional,

yaitu pinjam ke rentenir, tengkulak, pengijon, tetangga, atau saudara. Bagi masyarakat Madura yang di pedesaan, mereka memandang aktivitas kredit tradisional sangat diperlukan terlepas dari perhitungan kerugian di pihak nasabah, karena mereka menganggap bahwa para pemberi kredit tradisional ini adalah penolong yang selalu ada setiap diperlukan. Pandangan ini jelas berbeda dengan pandangan pemerintah serta lembaga finansial modern, yang menganggap pemberi utang tradisional terlalu besar mengambil bunga pinjamannya.

Pada umumnya masyarakat yang berada di perkotaan, atau masyarakat urban sudah memahami kredit modern. Mereka pada umumnya melakukan perkreditan bagi kepentingan produktivitasnya. Untuk keperluan kredit mereka berhubungan langsung dengan lembaga perbankan, karena sudah mengetahui seluk beluk perktreditan. Bagi sebagian warga kota kredit dianggap dapat menguntungkan usaha mereka. Mereka memahami resiko dari peminjaman uang di lembaga bank yang dipilih, sehingga mereka mulai mencari lembaga perbankan mana yang dianggap dapat mengecilkan resiko kerugian. Disini mereka benar-benar memahami perkreditan serta aspek pasar, sehingga mereka dapat memperhitungkan keuntungan sebesar mungkin, anggunannya berupa barang berharga, entah itu surat rumah, tanah, atau bentuk kekayaan lainnya tidak dilelang oleh bank. Perhitungan ini harus dipahami oleh mereka yang mau berusaha di bidang wiraswata secara mandiri dengan modal pinjaman dari bank ujar seorang responden.

Hal ini akan berbeda dengan masyarakat di kalangan bawah yang pada dasarnya tidak memiliki barang berharga untuk anggunan, tidak memahami seluk beluk administrasi perbankan, serta tidak memahami sama sekali perjanjian atau kontrak yang ditandatangani dalam soal utang piutang. Oleh sebab itu, golongan masyarakat inilah yang jarang memanfaatkan kredit lunak dari pemerintah. Bahkan, mereka pun tidak dapat memannfaatkan bantuan dari pemerintah yang dikelola secara berkelompok dan dikelola oleh desa. Golongan masyarakat inilah yang menjadi fokus perhatian dari penelitian ini, karena mereka belum dapat memahami serta mengakses pinjaman yang pada dasarnya adalah untuk mereka.

Kebutuhan akan uang kontan bagi warga desa menjadi permasalahan yang kompleks, apalagi warga desa yang secara ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, sehingga terpaksa hidup dalam utang piutang, mencari pinjaman kepada orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia memberikan utangan. Bahkan tidak jarang dari mereka yang tidak dapat melepaskan diri dari beban utang tersebut. Pada umumnya seseorang berutang karena tidak didukung oleh sumber daya ekonomi, sehingga bergantung kepada institusi utang yang diperankan oleh rentenir atau *tengkulak*.

Utang piutang antara nasabah dengan rentenir sudah menjadi pola perilaku sosial ekonomi dalam budaya mereka. Untuk memperpanjang utang nasabah, maka rentenir menciptakan budaya ketergantungan utang kepada nasabahnya, terutama nasabah yang dianggap baik atau tidak bermasalah dalam proses melunasi utangnya. Caranya adalah, seorang rentenir akan terus memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut, walaupun utang pertamanya belum lunas, demikian seterusnya sehingga nasabahnya terikat terus dengan utangnya kepada rentenir tersebut. Ada semacam ikatan utang-piutang yang kuat, dan tidak dapat dilepaskan sehingga terjadi ikatan yang sifatnya tak berkesudahan. Jadi hubungan antara nasabah dengan rentenir pun tidak terlepas dari ikatan patron klien.

Untuk memutus mata rantai ikatan utang piutang antara nasabah dengan rentenir sudah dilakukan sejak awal abad ke-20, masa pemerintahan Hindia Belanda, walaupun tidak berhasil memutus mata rantai tersebut, akan tetapi hal ini merupakan hal yang positif bagi pemerintahan Indonesia dewasa ini, di mana program tersebut dapat dijadikan contoh untuk mengenalkan sistem kredit modern yang menerapkan bunga ringan. Setelah kondisi ekonomi dan politik Indonesia stabil, terutama Era Orde Baru, pemerintah berusaha untuk menerapkan lembaga perbankan dan kredit formal bagi rakyat melalui berbagai kebijakan. Kredit modern diperkenalkan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan, seperti program KUD, BUUD, IDT, dan PNPM. Program tersebut direspons oleh masyarakat, hanya saja dalam berkembangannya setiap daerah berbeda dalam merespons kebijakan pemerintah tersebut.

Ada daerah yang tidak dapat merespons bantuan pemerintah secara berkelanjutan, ada juga daerah yang dapat merespons bantuan pemerintah dengan baik dan berkelanjutan, tetapi ada juga daerah yang mentransformasikan kebijakan pemerintah dengan kearifan lokal. Lembaga simpan pinjam untuk masyarakat golongan yang dikategorikan miskin yang diteliti merupakan lembaga keuangan yang berkembang sesuai dengan aspirasi warga dan pengelola yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan dan berjalan dengan lancar sampai saat ini. dan satu bentuk simpan pinjam yang sederhana yang dikelola secara swadaya, Perkembangan lembaga keuangan non formal yang dapat memahami kebutuhan masyarakat ini secara aktif meminjamkan uang dengan cara mereka, dan sampai sekarang masih tetap eksis, seperti Simpan Pinjam Mitra Bahari di desa KiIensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Perubahan pola pikir masyarakat di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo terhadap rentenir sekarang sudah ada. Salah seorang responden mengungkapkan bahwa ia tidak berani meminjam uang kepada rentenir, walaupun itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia berusaha meminjam uang kontan kepada tetangga, saudara, atau lembaga simpan pinjam uang yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu arisan di desanya. Ia berusaha untuk membayar sesuai dengan peraturan simpan pinjam, karena apabila ia meminjam uang dan mengembalikannya tanpa ada masalah, maka pada saat ia membutuhkan uang kontan lagi pengelola simpan pinjam akan mudah memberikan pinjaman. Ia tidak berani meminjam kepada rentenir, karena ia menyaksikan tetangganya yang pinjam kepada rentenir mengalami kesulitan dalam membayar. Tetangganya meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp. 1.000.000, harus mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 4 bulan dengan senilai Rp.1.400.000,., ketika tidak bisa membayar, maka ia dikenakan bunga sebesar Rp 100.000 setiap kali ia menunggak, sampai pinjaman pokoknya terlunasi. Ia membayangkan betapa sulitnya membayar lunas kepada rentenir, karena bunganya terlalu besar. Untuk menjaga agar dirinya tidak terlilit utang, maka ia tidak mau berhubungan dengan rentenir, caranya adalah hidup hemat, menggunakan uang sesuai dengan

kebutuhan saja tidak usah terlalu konsumtif. Sisa uang ditabungkan untuk digunakan nanti apabila diperlukan.

Pergeseran budaya utang ini tidak dapat terjadi tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak, pengelola institusi kredit formal di pedesaan, pemerintah, pendamping, orang-orang berpengaruh di desa, serta masyarakat yang menjadi sasaran dari pinjaman lembaga kredit formal modern sederhana, yaitu koperasi Mitra Bahari..

Mitra Bahari dibentuk sekitar tahun 2003 dengan modal Rp. 40.000.000. sebagai koperasi serba usaha. Modal diperoleh atas kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan UNEJ. Pada awalnya modal diberikan berdasarkan hibah dari pemerintah daerah dan dikelola oleh masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan orang-orang yang paham tentang administrasi simpan pinjam secara sederhana. Latar belakang dibentuknya Koperasi Mitra Bahari adalah:

1. Kehidupan ekonomi masyarakat nelayan bergantung kepada hasil tangkapan ikan, kadang menguntungkan kadang tidak menguntungkan. Hal inilah mengakibatkan pendapatan nelayan menjadi tidak menentu, sementara kebutuhan sehari-hari harus tetap tercukupi.
2. Ingin mengubah pola berpikir masyarakat, terutama masyarakat nelayan kecil dan menengah, yang pada awalnya hanya bergantung kepada pemilik modal/juragan. Di samping itu, para istri nelayan bergantung kepada penghasilan suami semata-mata, padahal penghasilan suami tidak menentu. Waktu yang panjang pada saat menunggu hasil tangkapan suami tidak dimanfaatkan untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat produktif.
3. Secara ekonomi dan budaya, nelayan kecil selalu bergantung kepada tengkulak atau pengambe untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama pada musim paceklik. Untuk itu ada beberapa tokoh yang berupaya untuk mengubah nasib para nelayan agar tidak terjerat dalam budaya utang yang tidak menguntungkan.
4. Menghindari rentenir yang memanfaatkan kondisi nelayan.

Mitra Bahari berarti teman laut maksudnya wadah untuk mengumpulkan para nelayan, atau komunitas laut. Pada awalnya jumlah anggotanya sekitar 100

orang, terdiri atas laki dan perempuan, 90 % dari anggotanya adalah perempuan. Tujuan dari Mitra Bahari adalah memberikan pinjaman kepada kelompok pengusaha kecil (para nelayan diusahakan berkelompok sesuai dengan keahliannya dengan jumlah sekitar 10 orang perkelompok, dan ditunjuk ketua kelompoknya yang bertanggungjawab terhadap peminjaman dan angusuran pengembalian pinjaman nantinya). Pinjaman diberikan secara bergulir dan berkelompok dengan bunga lunak. Tujuan pemberian pinjaman kepada kelompok adalah untuk meningkatkan produksi olahan rumahan yang dikelola oleh ibu-ibu atau istri nelayan agar dapat meningkatkan hasil prtoduksi mereka. Usaha-usaha kelompok nelayan adalah pengolahan petis, terasi, ikan asin, dan sebagainya. Pinjaman diberikan sesuai dengan kebutuhan perkelompok dengan bunga rendah, yaitu 1,5% perbulan, masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab akan pengembalian utang mereka. Jangka waktu peminjaman sekitar 3-4 bulan, apabila terjadi paceklik, waktunya diperpanjang, hanya bunganya tetap harus dibayar. Akan tetapi, setelah berjalan beberapa tahun, simpan pinjam di Mitra Bahari ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Pinjaman tidak dapat kembali seperti harapan para pengelolanya. Kendalanya ada pada para peminjam yang belum menyadari arti pentingnya mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Pengelola berusaha untuk menagih dengan berbagai cara dan kebijakan, akan tetapi tetap terjadi berbagai tunggakan dengan berbagai alasan, seperti musim paceklik. Uangnya habis untuk menyekolahkan anak, untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan ada yang berpendapat bahwa uang itu sebagai hibah dari pemerintah sehingga tidak dikembalikan pun tidak apa-apa. Pada intinya ketua kelompok pun tidak dapat memaksakan kepada anggotanya untuk melunasi utangnya kepada Mitra Bahari, sehingga koperasi Mitra Bahari mengalami kesulitan dalam penagihan utang kepada nasabah. Akhirnya modal bukan bertambah tetapi semakin berkurang dari tahun ke tahun, sehingga para pengelola yang mempunyai idealisme terhadap masyarakat miskin ini berfikir dan berusaha keras untuk menyelamatkan sisa modal yang masih ada. Sampai sekitar tahun 2005 uang pinjaman yang tidak kembali sekitar Rp. 16.000.000,.

Kepedulian para pengelola terhadap keberlangsungan Mitra Bahari agar tetap berlangsung, pada akhirnya menemukan cara yang dapat menyelamatkan modal bahkan mengubah paradigma masyarakat terhadap utang dalam bentuk kredit. Cara yang digunakan berdasarkan pengamatan dan pemahaman karakter masyarakat, karena para pengelola Mitra Bahari ini merupakan tokoh masyarakat dan warga Desa Kilensari, mereka berusaha mengubah mekanisme utang piutang, agar masyarakat menyadari dan mersa memiliki lembaga Mitra Bahari sebagai bagian dari lembaga ekonomi perbankan desa yang sederhana dan dapat memenuhi kebutuhan mereka, minimal tidak sering pinjam kepada para rentenir yang menerapkan bunga tinggi.

Sistem lama dalam proses pinjam meminjam berdasarkan kelompok dan tanpa jaminan. Pada umumnya besar pinjaman bergantung kepada ketua kelompok, sehingga para anggota kelompok ada yang merasa tidak meminjam bahkan kadang terjadi saling curiga mencurigai. Ketua kelompok pun kadang tidak merasa bertanggung jawab terhadap utang para anggotanya karena mereka pun kadang kesulitan untuk menagih utang anggota kelompoknya dengan berbagai alasan. Sistem baru mengubah cara pinjaman, tidak berdasarkan kelompok lagi, tetapi personal atau individu. Koperasi Mitra bahari mengubah bentuk dari koperasi serba usaha pada koperasi pinjaman berdasarkan jaminan. Jaminan berupa barang berharga, fungsinya semacam asuransi, apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka jaminan itulah yang dijadikan asuransi untuk mengembalikan pinjamannya. Sistem ini menyerupai sistem yang digunakan oleh lembaga pegadaian. Bunga yang diterapkan bergantung kepada jangka waktu pengembalian, akan tetapi kisarannya masih lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman dari rentenir.

Dengan sisa modal yang masih ada, Mitra Bahari tidak menyuntik modal dari luar supaya mandiri, para pengurus berusaha untuk mensosialisasikan tujuan dan keinginan untuk mempertahankan Mitra Bahari sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu warga pada saat membutuhkan uang kontan dalam waktu yang mendesak. Maksud dari adanya jaminan dalam bentuk barang berharga agar masyarakat secara sadar mengembalikan dan melunasi utangnya, karena uang

yang dipinjamkan bukan hibah tetapi memang utang piutang. Upaya Mitra Bahari untuk menjadi sebuah lembaga keuangan desa tidak terlepas dari keinginan para pengurus serta warga setempat yang merasa prihatin dan peduli terhadap masyarakatnya yang selalu terjat dalam hutang piutang dengan bunga tinggi kepada rentenir tanpa daya. Kemudian orang-orang yang tanggap seperti Bapa Nisan, Marwoto dan pengurus Mitra bahari lainnya berusaha untuk mendekati tokoh yang dihormati warga, mengadakan sosialisasi tentang upaya melepaskan diri dari jeratan utang. Sosialisasi diadakan kadang-kadang di balai desa pada acara-acara tertentu, kepada ibu-ibu pada saat mengadakan kegiatan PKK, arisan, atau saat pengajian, bahkan adapendekatan peribadi kepada tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Upaya ini pada akhirnya berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya kredit dengan bunga ringan bagi kepentingan mereka.

Pada awalnya keberadaan dan kegiatan Mitra Bahari ini pun dicurigai oleh orang-orang tertentu terutama yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan ini. Ada juga yang menghembuskan isu bahwa uang yang disimpan di Mitra Bahari hanya akan digunakan oleh pengurus (Wawancara dengan Pa Nisan), akan tetapi lama kelamaan, masyarakat percaya kepada Mitra Bahari sebagai lembaga keuangan yang diharapkan oleh mereka, karena pada kenyataannya, para pengurus tidak menggunakan uang koperasi untuk kepentingan mereka, tetapi untuk membantu para peminjam atau nasabah. Anggunan memang disertakan dalam peminjaman, supaya masyarakat sadar dengan penuh tanggungjawab melunasi hutangnya, dan anggunan akan dikembalikan kepada para nasabah apabila sudah melunasi pinjamannya.

Sejak tahun 2005 Mitra Bahari semakin berkembang baik mengenai modal maupun jumlah anggota. Sistem peminjam tidak berkelompok lagi, akan tetapi secara personal. Modal yang tersisa dijadikan modal dan dipinjamkan kepada anggota atau yang membutuhkan uang. Pinjaman harus disertai anggunan atau jaminan. Pada umumnya masyarakat nelayan memiliki tabungan dalam bentuk emas, sehingga anggunannya berupa emas. Emas ditaksir oleh yang ahli dalam hal

ini merangkap manager. Setelah ditaksir kemudian diberi harga, emas disimpan oleh Mitra Bahari.

Bunga pinjaman di Mitra bahari bergantung kepada jumlah pinjaman. Pinjaman di bawah Rp. 1.000.000,. dikenakan bunga sebesar 4% perbulan, di atas Rp.1.000.000,. dikenakan bunga sebesar 3% perbulan, maksimal peminjaman sekitar Rp. 3-4 Juta. Bunga yang relatif ringan sekitar 4% dan 3% perbulan meringankan nasabah. Bunga 4% terdiri atas bunga pokok 2%, dana provisi 1%, dan dana administrasi 1%, para nasabah relatif lancar mengembalikan pinjamannya. Diperkiraan hanya sekitar 5 % dari jumlah nasabah yang sulit mengembalikan pinjamannya, pada umumnya karena faktor ekonomi(Wawancara dengan Pengurus Mitra Bahari).

Jumlahnya anggota Mitra Bahari sekarang sekitar 100 orang, mayoritas anggotanya adalah perempuan. Tidak ada iuran wajib, hanya apabila seorang nasabah akan meminjam uang, maka ia harus menyimpan barang berupa emas sebagai tanggungan pinjamannya yang mereka namakan jaminan. Berdasarkan keterangan dari beberapa responden bahwa uang pinjaman digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan, seperti untuk pembuatan petis (pembuatan petis rumahan), pembuatan ikan asin, dan sebagainya, juga untuk kebutuhan sehari-hari terutama pada saat paceklik karena para suami tidak dapat melaut, untuk keperluan sekolah, dan untuk keperluan selamatan. Bulan Juni sampai September merupakan bulan terbanyak jumlah peminjaman, karena bulan Juni adalah bulan menjelang anak-anak masuk sekolah, awal musim paceklik, dan pada saat menjelang hari raya Islam atau Idul Fitri (Wawancara dengan pengurus). Bulan Agustus-September pinjaman digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup (wawancara dengan beberapa responden yang juga sebagai nasabah).

Budaya masyarakat setempat pada umumnya adalah konsumtif, tampak pada pada saat menjelang hari Idul Fitri, pinjaman banyak yang dilunasi agar jaminan berupa perhiasan dapat dikembalikan dan digunakan pada saat bersilaturahmi kepada tetangga atau saudara. Pada saat-saat tertentu, masyarakat nelayan terutama kaum perempuannya menggunakan perhiasan untuk kepentingan

stile atau gaya dalam penampilan, perhiasan emas juga merupakan simbol kesuksesan seorang pemakainnya. Tingkat kemakmuran atau keberhasilan seseorang dilambangkan melalui pemakaian perhiasan, sehingga pada saat hari Lebaran (hari Idul Fitri), maka para istri nelayan berusaha untuk memakai perhiasan sebanyak mungkin. Hari ke tujuh setelah Idul Fitri biasanya perhiasannya dikoperasikan (istilah para Anggota koperasi) lagi atau dijadikan anggunan di Mitra Bahari kembali.

Dalam hal ini perhiasan merupakan lambang keberhasilan, status sosial, juga sebagai investasi atau tabungan para istri nelayan. Bagi masyarakat nelayan menabung untuk masa depan bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk perhiasan emas. Mereka berpendapat bahwa emas dapat digunakan sebagai perhiasan sekaligus status sosial ekonomi. Manfaat ekonomi dari emas dapat dijual cepat apabila memerlukan uang kontan secara mendadak. Emas lebih mudah dijual dibandingkan tanah, sehingga para istri nelayan lebih menyukai berinvestasi emas daripada yang lainnya.

Sekarang Mitra Bahari jarang mengalami kerugian, karena ada anggunan atau jaminan utang piutang. Selain itu, juga peran dari para pengurusnya. Kontak langsung antar pengurus dengan nasabah sangat berpengaruh bagi kelancaran pengembalian peminjam, pengurus secara perlahan-lahan mengingatkan para nasabahnya untuk membayar secara teratur, serta tidak mendenda secara sewenang-wenang kepada para nasabah yang belum dapat melunasi utang sesuai dengan perjanjian. Mereka diberi peluang dahulu dengan cara penangguhan, dan diberi surat pinjaman baru, sebagai sisa pinjaman dengan bunga yang tetap ringan. Dengan demikian, para nasabah tidak merasa dirugikan, dan berusaha untuk membayar hutangnya, kecuali karena memang tidak memiliki uang sama sekali. Apabila seorang nasabah beranggapan bahwa dirinya tidak dapat melunasi utang, maka ia akan menemui pengurus dan mengijinkan anggunan atau jaminannya dijual, hasil jualan emasnya untuk menutup hutang.

Ada hal yang cukup menarik dalam cara penjualan emas, di mana si nasabah sendiri dapat menjual terlebih dulu emasnya ke toko emas, kemudian utangnya dilunasi. Ada juga yang mempercayakan penjualan emas kepada

pengurus Mitra Bahari. Setelah emas dijual oleh salah seorang pengurus ke toko emas di jual sesuai dengan harga pasaran, kemudian uang hasil penjualan emas ini digunakan untuk meneutupi utang beserta bunga, ditambah ongkos untuk menjual emas sebesar Rp. 5.000,00. Sisa dari penjualan emas ini akan diberikan kepada nasabah. Jadi seorang pengurus harus punya keahlian menaksir emas dan punya relasi dengan pedagang emas. Hubungan kepercayaan pengurus Mitra Bahari dengan nasabah terjalin dengan erat berdasarkan kepercayaan. Kedekatan yang bersifat kemitraan dan kekeluargaan menumbuhkan rasa percaya, sehingga nasabah sering mempercayai penjualan anggunannya kepada pengurus.

Fungsi ekonomi dari Mitra Bahari sudah dirasakan oleh para anggota, sehingga keberadaan Mitra Bahari tetap berlangsung sampai saat ini, masyarakat mulai mengubah pola berkepercayaan dari pola kredit kepada rentenir tanpa dipikirkan dampaknya, menjadi pola berpikir ekonomis karena mereka mulai merasa keuntungan dari sistem pinjam meminjam secara legal. Apabila seorang nasabah belum dapat melunasi pinjamannya dalam jangka yang telah ditentukan, maka pengurus Mitra Bahari akan memperbaharui surat pinjaman, tidak langsung menerapkan sanksi dan mengeksekusi jaminannya. Tujuannya agar nasabah tidak merasa berat dengan pinjamannya dan diberi kesempatan untuk berusaha agar dapat mengembalikan pinjamannya pada waktu yang akan datang. Tindakan dari pengurus seperti ini mempengaruhi cara pandang nasabah terhadap sistem kredit legal. Perubahan cara pandang ini berpengaruh pada pengembalian pinjaman, mereka mengembalikan dan melunasi utang sebagai suatu rasa tanggung jawab bukan karena ketakutan seperti yang dirasakan apabila pinjam kepada rentenir.

Mitra Bahari pun dapat diterima masyarakat, karena keuntungan yang didapat bukan hanya untuk kepentingan lembaga saja, melainkan untuk kepentingan kegiatan sosial masyarakat setempat, seperti pada saat ada acara selamatan masyarakat nelayan, yaitu acara Petik Laut, Mitra Bahari menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,00. Mitra Bahari dapat diterima masyarakat, karena telah menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Kepengurusan Mitra Bahari sekarang adalah kepengurusan yang bekerja dalam periode 2009-2011 Ketua adalah M. Nisan, Mahmudah sebagai manager merangkap juru taksir, Asmani bagian unit Jasa Asmani, Maryati unit simpan pinjam, Fajariah, S.E sebagai bendahara, adapun sekretaris Marwoto, S.E. Para pengurus berusaha menjadikan Mitra Bahari sebagai lembaga ekonomi yang modern yang profesional, caranya dengan mengikutsertakan para pengurus ke berbagai pelatihan atau kursus dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Tujuan dari pengiriman pengurus ke berbagai pelatihan yang berkaitan dengan aktivitas koperasi, agar para pengurus dapat memahami dan menerapkan sistem simpan pinjam modern. Pada saat peneliti mengadakan penelitian, buku administrasi serta penyimpanan anggunan tertata rapih, menandakan sistem kerja pengurus Mitra Bahari sudah profesional. Setiap tahun Mitra Bahari semakin berkembang. Tempat Mitra bahari sampai sekarang masih kontrak, akan tetapi dari keuntungan lembaga itu, maka Mitra Bahari dapat memberikan uang lelah (honor) bagi para pengurusnya sesuai dengan kerja mereka. Pengawasan dilakukan bersama dalam arti di antara para pengurus, dengan kemauan kerja keras dan kejujuran di antara para pengurusnya, akhirnya Mitra Bahari menjadi mandiri, sekarang modalnya sekitar Rp.151.717.000.

Keberhasilan Mitra Bahari sebagai salah satu lembaga kredit modern sedikit demi sedikit berhasil mengubah pandangan masyarakat akan kredit formal yang dianggap rumit. Sistem kredit modern yang dikelola dengan penuh tanggungjawab oleh pengurusnya dan didukung oleh para tokoh serta nasabah, pada dasarnya dapat juga mengubah pola perilaku masyarakat dalam meminjam dan mengembalikan pinjamannya. Transaksi kredit dianggap tidak berbelit-belit, anggunan atau jaminan barang berharga yang harus disimpan di Mitra Bahari dianggap hal yang wajar, bahkan memotivasi mereka (para peminjam) untuk melunasi utangnya agar barang berharga yang dijaminan segera dimiliki kembali.

Selain proses transaksi peminjaman tidak rumit, juga ada berbagai kemudahan, antara lain pada saat peminjam belum dapat mengembalikan, tidak dilakukan finalti oleh pengurus. Bahkan, pengurus memberi kesempatan kepada

para peminjam yang belum dapat mengembalikan utangnya dengan surat pinjaman baru. Pendekatan yang dilakukan oleh para pengurus Mitra Bahari terhadap nasabah serta warga sekitar dalam menagih utang (dengan cara mengingatkan telah jatuh tempao), membuat warga sadar akan hutang yang harus dilunasinya. Kejujuran pengurus dalam mengelola lembaga serta kemudahan administrasi, menimbulkan kepercayaan antara pengurus koperasi dengan nasabah. Dalam hal ini Mitra Bahari dapat memenuhi kebutuhan para nelayan kecil, sekaligus secara sosial budaya cocok dengan kondisi lingkungan masyarakat nelayan. Mereka menganggap bahwa Mitra Bahari berasal dari mereka oleh mereka, dan untuk mereka, mengakibatkan mereka berusaha mempertahankan lembaga kredit mereka.

Budaya pinjam warga kepada rentenir tidak dapat dihapus begitu saja, akan tetapi paling tidak keberadaan Mitra Bahari telah mengurangi ketergantungan warga meminjam kepada rentenir secara berkesinambungan. Warga masih ada yang bergantung kepada rentenir karena alasan-alasan budaya ekonomi, dan politis, sehingga diperlukan sinergi yang seirama lembaga sosial, ekonomi, serta politik untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir.

Pergeseran budaya masyarakat yang berkaitan dengan budaya kerja juga semakin tampak berubah, terutama istri-istri nelayan. Menurut salah seorang responden, dulu istri-istri nelayan mengisi waktu senggang hanya dengan mengobrol di antara mereka. Waktu mereka lebih banyak dihabiskan hanya untuk mengobrol dengan tetangga sambil menunggu hasil tangkapan suami, sebagian besar para istri nelayan ini tidak produktif. Sulit untuk ke luar dari lingkaran kemiskinan. Sejak ada kegiatan pembuatan produksi olahan rumahan seperti petis, keripik, ikan asin, maka ekonomi rumah tangga para nelayan agak teratasi, walaupun belum dapat ke luar secara permanen dari kemiskinan. Para istri nelayan inilah yang memanfaatkan koperasi Mitra Bahari, terutama pada saat mereka membutuhkan uang sebagai modal usahanya. Produksi mereka kecil-kecilan, akan tetapi karena dibentuk semacam kemitraan dalam penjualannya, maka produksi rumahan yang mayoritas dikelola oleh para istri nelayan ini dapat menambah ekonomi rumah tangga.

4.3.4 Budaya Pengeluaran Uang Masyarakat Jawa

Pada awalnya masyarakat Jawa di eks Keresidenan Besuki menempati daerah-daerah yang cenderung bersifat tanah sawah, budaya bersawah sudah menjadi kehidupan masyarakat, sementara Madura menempati daerah-daerah yang secara topografi merupakan daerah tegalan. Jadi masyarakat membawa budaya agrarisnya ke daerah eks Keresidenan Besuki.

Budaya agraris melatarbelakangi budaya Jawa, sehingga penggunaan uang pun tidak terlepas dari pola budaya ini. Budaya yang terbentuk tidak jauh berbeda dengan pola budaya yang dilakukan oleh Masyarakat Madura, hanya ada dalam hal-hal tertentu yang berbeda. Pandangan tentang uang bagi masyarakat Jawa pun sama dengan Madura. Mayoritas responden mengatakan peran penting uang dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Uang bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan juga berperan penting dalam mengikat keakraban kehidupan sosial antar warga. Pengeluaran uang yang cukup besar berkaitan dengan selamatan.

Slametan diadakan hampir disemua kesempatan yang mempunyai arti ritual, hari besar keagamaan, siklus kehidupan, mendapat rejeki, bersih desa, sebagainya. Slametan diadakan hampir setiap setiap waktu, hanya saja seluk beluk upacara selamatan berbeda antara satu dengan lainnya, seperti dalam persiapan makanan, pembacaan doa, tamu yang diundang, kegiatan simbolis, serta sarana yang berhubungan dengan acara selamatan. Hanya saja tujuan dan bentuk selamatan sama tidak berubah. Selamatan dapat dilaksanakan secara personal maupun bersama-sama intinya tetap sama yaitu sakral.

Menurut Geertz (1987:58-59) slamet dapat diterjemahkan kedalam pengertian sejahtera, selamat, sehat, dan makmur yaitu suatu keadaan yang secara harfiah tidak terjadi apa-apa pada diri seseorang (ga ana apa-apa). Seseorang menjadi slamet adalah menjadi aman dalam arti tidak diganggu oleh bahaya-bahaya alam maupun adikrodati. Slamet menunjukkan suatu keadaan sejahtera yang abstrak yang ditandai secara negatif oleh bebas dari pengaruh-pengaruh asing atau yang mengacaukan dunia ini atau dunia yang akan datang. Dalam slametan, orang Jawa tidak memohon kegembiraan, kebahagiaan, kemakmuran,

melainkan hanya memohon agar tidak terjadi apa-apa yang mengganggu atau menyedihkan mereka yang membuat mereka menjadi miskin, atau membuat mereka menjadi sakit. Mereka tidak memohon roh-roh halus membuat sesuatu bagi mereka, tetapi hanya memohon agar roh-roh halus tidak mengganggu atau melakukan sesuatu terhadap dirinya.

Penyelenggaraan selamatan sudah barang tentu memerlukan uang, akan tetapi pada saat ditanyakan berapa pengeluaran yang diperlukan dalam suatu kegiatan selamatan, rata-rata responden tidak dapat menentukan jumlah nominalnya secara pasti. Sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang yang akan mengadakan selamatan hanya memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan. Pada umumnya orang yang mengadakan selamatan tidak pernah mencatat jumlah pengeluaran untuk kegiatan selamatan secara rinci. Dalam arti ekonomis, kegiatan selamatan ini dapat saja menggambarkan kekayaan seseorang yang sebenarnya, jadi dalam hal ini harus dianalisis bahwa fenomena uang sangat komparatif. Dalam hal ini kekayaan berhubungan dengan status sosial dan kemakmuran yang relatif dengan persepsi ekonomi masyarakat.

Masyarakat Jawa terutama yang ada di pedesaan masih akrab dengan Selamatan. Selamatan yang masih dilakukan antara lain siklus kehidupan, dari kelahiran, pernikahan, sampai kematian pun masih diselenggarakan, terutama selamatan pernikahan. Dalam selamatan ini, uang menjadi hal yang sangat penting. Bahkan beberapa responden mengatakan bahwa selamatan pernikahan sampai *direwangi* (diusahakan) meminjam uang dulu atau menjual barang berharga, atau tanah, agar dapat dirayakan dengan pantas. Ukuran pantas bergantung dari status seseorang, sehingga status sosial pun membawa konsekuensi terhadap pengeluaran uang. Selain selamatan pribadi juga masih ada selamatan yang dilakukan bersama, dan dananya pun ditanggung bersama, seperti bersih desa.

Secara historis, di pedesaan dalam peristiwa penting seperti yang berkaitan dengan siklus kehidupan, selamatan, dan sebagainya, maka kepala keluarga berusaha memberikan sumbangannya berupa uang, hasil panen, atau jasa. Tenaga kerja yang diperlukan untuk persiapan dan perayaannya dinamakan kelompok

sinoman (perkumpulan untuk saling membantu terutama anak-anak muda), hanya sekarang sudah terjadi pergeseran karena sinoman ini sudah mulai menghilang. Bagi kepentingan umum yang berkaitan dengan desa seperti pembuatan jalan, pengairan, pembuatan gardu desa, dan sebagainya dikerjakan bersama, dan kegiatan ini dinamakan *kerig* desa. Kegiatan bersama *kerig* desa ini membutuhkan berbagai macam partisipasi dari berbagai kelompok sosial, dan penduduk inti desa mempunyai tanggungjawab utama dalam pelaksanaan *kerig* desa. Masyarakat di luar kriteria itu, atau tidak memiliki pekerjaan tetap hanya mempunyai beberapa tugas kewajiban saja. Beberapa bantuan tenaga kerja yang dinamakan *pancen* tersedia bagi kepala desa. Bantuan tersebut diperici menurut fungsinya, seperti *janggol* (memberi bantuan umum), *gundal* (menemani kepala desa dalam suatu perjalanan), *pelengkung* (menjadi pesuruh). Semua tenaga kerja tersebut mewakili pemberian jasa yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan desa pada umumnya. Karena itu merupakan suatu hal yang lumrah jika pengerahan tenaga kerja seperti itu dianggap sebagai bagian dari sistem gotong royong atau sambat sinambat atau menolong sebagai sesama (Kartodirdjo,1992:259-260).

Sumbangan dipahami sebagai bentuk gotong royong oleh masyarakat. Gotong royong merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial khas masyarakat agraris tradisional. Masyarakat ini terikat satu sama lainnya berdasarkan elasi sosial yang disebut ikatan primodial, yaitu melalui ikatan keluarga, dekatnya letak geografis, serta iman kepercayaan. Solidaritas yang terbentuk didasarkan kepada ikatan emosional dan solidaritas mekanis, dikenal sebagai masyarakat yang terintegrasi secara struktural, pertukaran sosial bersifat langsung dan terbatas, anggota masyarakatnya bersifat homogen dalam mentalitan dan moralitas, serta mempunyai kesadaran suatu kesadaran kolektif serta iman kepercayaan bersama, dan perbedaan fungsi atau pembagian kerja yang sedikit sekali (Kartodirdjo,1987:254).

Sumbangan terbesar pada umumnya dikeluarkan pada saat menghadiri acara pernikahan. Hampir sebagian besar responden mengatakan sumbangan untuk acara pernikahan anak lah yang sangat besar dalam kehidupan keluarga mereka. Pernikahan merupakan acara sakral sekaligus mengumpulkan keluarga

besar, serta mengantarkan anak ke dunia baru. Besar sumbangan bergantung kepada orang yang mengundang dan tempat undangan. Rata-rata untuk sekali undangan antara Rp. 30.000, sampai Rp. 50.000, Di perkotaan antara Rp. 50.000, sampai Rp100.000, Menurut salah seorang responden di perkotaan apabila resepsi pernikahan di rumah, rata-rata yang membawa *bowo* (sumbangan) sekitar Rp. 50.000, kalau di gedung sekitar Rp. 100.000, Bulan yang dianggap baik untuk mengadakan resepsi adalah bulan menjelang bulan puasa, dan bulan setelah hari raya Idul Fitri (Besar). Pada bulan-bulan tersebut undangan resepsi pernikahan baik dari saudara, teman, atau tetangga berdatangan. “Jadi ya lumayan juga pengeluaran untuk acara pernikahan karena dalam satu minggu yang mengundang kadang-kadang lebih dari tiga orang, “dapat dibayangkan berapa uang yang harus disiapkan” kata seorang responden.

Pendapat seperti ini dapat ditafsirkan sebagai suatu keluhan, akan tetapi seseorang pasti berusaha untuk menghadiri undangan terutama undangan saudara atau tetangga terdekat. Jadi, uang diusahakan ada entah dengan cara bagaimana, “*yo opo carane, direwangi utang se, sing penting duite ono* (uang harus ada)” begitu kata seorang responden.

Hubungan kekeluargaan terikat rasa guyub, sehingga bagi masyarakat sumbang menyumbang sudah merupakan suatu kewajiban, di satu sisi warga berusaha untuk melaksanakan tradisi sumbangan ini, di sisi lain secara finansial kadang-kadang sumbangan menyedot pengeluaran yang cukup besar. Hanya saja masyarakat tetap melaksanakannya, karena tidak ingin terkucilkan dari lingkungan pergaulan mereka dan menjadi bahan pembicaraan yang menyudutkan posisinya sebagai warga di sekitarnya.

Berbeda dengan acara menengok kelahiran, melayat kematian, menghadiri acara sunatan (sepitan), bersih desa, dan sebagainya. Dalam hal sumbangan, tidak ada nilai nominal yang ditetapkan, bergantung kepada kerelaan, karena tidak ada besaran nominal yang ditentukan, maka warga lebih tidak terbebani. Hanya saja sumbangan untuk melayat kematian kadang-kadang dalam bentuk makanan mentahan, seperti gula, mie, beras, dan minyak goreng, apabila ditotal nominal harganya sekitar Rp. 25.000, sampai Rp. 30.000,.

Pengeluaran uang untuk kegiatan keagamaan pun dilakukan oleh masyarakat secara sukarela, terutama yang berkaitan dengan zakat. Mereka berusaha untuk membayar zakat karena itu merupakan kewajiban, hanya dibalik itu semua ada harapan agar rejekinya juga dimudahkan.

Pengeluaran yang berkaitan dengan politik, hanya lapisan atas masyarakat yang cenderung berkecimpung di bidang pemerintahan atau politik. Bagi mereka yang ingin menjadi anggota dewan atau sejenisnya, biasanya mengeluarkan uang untuk mencari pendukungnya.

Jadi uang pun mempunyai banyak fungsi, sebagai ikatan hubungan sosial, rasa keguyuban, keagamaan, dan politik, bukan hanya berfungsi di bidang ekonomi saja.

4.3.4 Budaya Utang Masyarakat Jawa

Terkait dengan utang, pemahaman orang Jawa pada umumnya sama dengan orang Madura. Utang merupakan urusan pribadi yang tidak usah diketahui oleh orang lain. Utang bagi orang Jawa pun mempunyai dua arti, yaitu utang budi, Berkaitan dengan pengertian resiprositas, atau timbal balik.

Timbal balik ini berkaitan dengan sumbang menyumbang baik dalam bentuk materi maupun tenaga kerja. Tidak jauh berbeda dengan orang-orang Madura, akan tetapi ikatan yang ada di orang Madura tidak sama dengan orang Jawa. Madura diikat karena geneologis, sedangkan Jawa lebih bersifat wilayah geografis, sehingga ikatan timbal balik ini cenderung lebih longgar dibandingkan dengan orang Madura.

Pemahaman tolong menolong sudah menjadi tradisi bagi penduduk desa, tolong menolong dalam melakukan tugas-tugas yang bersifat pribadi, seperti pembagian air irigasi, pindah ke rumah baru, memasang atap, dan sebagainya. Masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, tanah, dan peternakan yang menyangkut kepentingan umum dalam suatu desa beserta pemecahannya harus dilakukan melalui usaha seperti *sambatan*, *sambat sinambat*, dan gotong royong. Solidaritas ini diperkuat oleh usaha-usaha bersama lainnya, seperti pembangunan lumbung, persamaian padi, dan lain sebagainya, serta sarana-sarana pengembangan kesadaran kolektif lainnya seperti upacara keagamaan yang

dilakukan untuk mengobarkan semangat desa. Dalam sistem sambatan sering disiapkan makanan dan kadang-kadang juga upah (majaran). Di Priangan dikenal dengan istilah *liliuran*, *rempugan*, *utang gigir*, dan *ngahiras* (Kartodirdjo,1987:260).

Masyarakat Madura mengenal sistem tonjokkan, demikian juga masyarakat Jawa yang ada di daerah pedesaan, sistem tonjokkan masih berlaku, seperti di daerah pedesaan Cluring kabupaten Banyuwangi. Seseorang yang akan mengundang acara pernikahan anaknya, maka yang diundang akan diberi undangan berupa makanan dalam kotak yang berisi nasi, daging ayam, dan lauk lainnya, juga irisan beberapa jajan desa seperti nagasari, lempur, kueh lapis dan sebagainya. Menurut salah seorang responden, pada waktu duku, makanannya ditempatkan dalam tampah berupa nasi, lauk pauk, dan jajan pasar, sehingga menjelang hari h, sekitar satu atau dua harii sebelum acara pernikahan, ibu rumah tangga yang dikirim makanan akan mengantarkan makanan mentah, bisa beras, daging, atau bahan mentah lainnya kepada calon keluarga pengantin, adapun uangnya diberikan pada hari pernikahannya. Hal ini menandakan suatu simbol bahwa yang diberi kotak makanan akan membawa *bowo* (uang) dalam jumlah yang sudah disepakati secara adat. Bowo yang dibawa merupakan suatu kesepakatan bersama yang tidak tertulis, hanya besarnya mengikuti flktuatif harga-harga sembako di pasaran. Menurut beberapa responden hal ini dianggap sebagai bentuk tabungan, karena pemberian itu akan dicatat oleh keluarga pengundang, dan suatu saat akan dikembalikan dalam jumlah yang sama, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai tabungan. Catatan pemberian dan penerimaan ini akan diingat, sehingga sudah menjadi kewajiban keluarga harus mengembalikan oemberian seseorang, walaupun yang diberinya sudah tiada atau meninggal dunia. Dewasa ini ada perbedaan antara masyarakat madura dengan masyarakat jawa dalam pemberian tonjokkan, dimana masyarakat Madura menggunakan bahan mentah berupa rokok dan sabun, sedangkan masyarakat Jawa menggunakan makanan yang sudah matang. Intinya sama yaitu suatu simbol dari status sosial dan ekonomi dari pegundang dan yang diundang menurut ukuran mereka.

Dalam acara pernikahan terutama di pedesaan, ada rasa guyub yang dikemas dalam simbol gotong royong, di mana warga terutama tetangga desa akan ikut berperan serta dalam acara pernikahan, hal ini menambah pengeluaran yang cukup besar bagi orang yang punya hajatan. Uang sudah tidak menjadi perhitungan lagi, yang penting orang-orang yang membantu hajatan mendapat perhatian dari yang punya rumah, yaitu makan. Akan tetapi sekarang ada sedikit pergeseran, terutama di perkotaan. Orang-orang yang membantu ditentukan oleh tuan rumah yang punya gawe/hajatan/perayaan, dan mereka diberi upah sesuai dengan harga pasaran. Dari yang ahli masak, tukang cuci-cuci di dapu, dan yang menyajikan makanan, sehingga tetangga hanya sebentar saja membantu tidak penuh seperti dahulu. Pergeseran ini mulai dirasakan sekitar awal tahun 2000-an. Tempat yang sempit dan tidak banyak membutuhkan tenaga kerja, menjadikan orang semakin ekonomi. Terlebih di perumahan dan tempat elite, perayaan pernikahan, bukan lagi menjadi milik bersama, tetapi sudah merupakan privasi seseorang, sehingga mereka cenderung menggunakan jasa katering dalam masak memasak, sehingga dianggap lebih efisien. Pergeseran ini terjadi karena masyarakat di perkotaan semakin heterogen. Rasa guyub ada, tetapi tidak mengikat antara satu dengan lainnya. Berbeda dengan di desa, ikatan sosial desa masih kuat, sehingga *rewang* merupakan tradisi yang masih mengikat mereka dalam tradisi *sambat sinambat*.

Sambat sinambat yang dahulu dikenal sebagai konsep *sinoman* merujuk pada saling berganti untuk *tolong menolong*. Pola untuk saling membantu sekaligus bermakna sebagai saling piutang, berutang uang, benda, maupun jasa. Arena bantu membantu seperti *sinoman*, digunakan untuk berbagi kelebihan juga sekaligus untuk mengakumulasi modal. Dalam *sinoman* terdapat mekanisme timbal balik, yang menyumbang akan disumbang di lain waktu, yang disumbang harus menyumbang di masa yang akan datang. Dinamika mekanisme berbagi/mengakumulasi memunculkan kehendak untuk membantu orang yang membutuhkan, sekaligus dengan pemahaman tidak kehilangan benda-benda yang dibagikan tersebut. Pada saat benda-benda diganti dengan uang, berlangsung kehendak untuk membantu dengan memberi utangan kepada orang lain, sekaligus

sebagai wahana untuk menabung uang, inilah dinamisme mengutang sekaligus menabung (Agusta,2014:84-85). Menurut Geertz (1972), berbagi dalam kemiskinan dipandang sebagai akomodasi lembaga sosial untuk mengelola kemiskinan.

Solidaritas sosial dalam suatu masyarakat didasarkan kepada prinsip pertukaran sosial, misalnya:

1. Sistem bercocok tanam dalam suatu masyarakat, yaitu pertukaran tanah dengan tenaga kerja.
2. Pancen, bantuan tenaga kerja yang siap bagi kepala desa, gugur gunung yaitu mengerjakan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa dibayar, kerig aji yaitu pergi melaukan suatu pekerjaan secara berkelompok, yaitu pertukaran tenaga kerja dengan jasa seperti perlindungan, keamanan, dan informasi.
- 3.Sumbangan atau *punjungan* (memberi bantuan atau hadiah), yaitu menukarkan barang dengan barang,

Pertukaran sosial menyatakan bahwa suatu pertukaran sosial menimbulkan suatu aturan moral bagi tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang mempunyai eksistensi sendiri, bebas dari situasi pertukaran sosial itu sendiri. Moralitas pertukaran sosial itulah yang menciptakan hubungan di antara individu-individu secara ekonomis, sosial, dan politis. Moralitas ini mempunyai dampak yang jauh lebih luas jangkauannya daripada situasi pertukaran sosial itu sendiri, dan tanpa terkecuali membentuk relasi-relasi sosial. Atas dasar inilah suatu pertukaran sosial yang berlangsung, dalam arti bahwa pemberi langsung mengharapkan akan mendapat sesuatu gilirannya dari penerima. Ada suatu keyakinan bahwa penerima akan berbuat seperti yang dilakukan si pemberi. Lebih lagi si pemberi mempunyai harapan bahwa suatu hari apa yang ia berikan akan diterima kembali jika bukan oleh dia sendiri, maka keluarganya akan menerima kembali. Hal ini sungguh relevan bagi apa yang disebut *hutang budi*, *gawe kebejikan* (melakukan hal yang baik), *ngalah luhur wekasane* (mempunyai tenggang rasa terhadap orang lain), *pada-pada* (berbuat demikian pula), *tepa selira* dan sebagainya (Kartodirdjo,1987: 255-256).

Proses pertukaran sosial bersama moralitas yang diakibatkannya, berlaku sebagai dorongan, atau sangsi, bagi kerangka hubungan kultural. Proses perubahan sosial menciptakan relasi-relasi sosial dan kultural yang ada dengan sendirinya, bebas dari tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengertian utang dalam utang piutang materi pada umumnya dilakukan secara tradisional maupun modern. Hanya saja bagi masyarakat di pedesaan yang kondisi ekonominya belum mapan, maka tengkulak dan rentenir menjadi tumpuan mereka.

4.3.6 Pergeseran Sistem Kredit

Dewasa ini kredit lebih banyak dikenal sebagai istilah perbankan. Bagi masyarakat kredit adalah transaksi barang tidak kontan atau pelunasannya berdasarkan angsuran. Pengertian kredit secara ekonomi adalah harga hari ini dan harga yang akan datang, di mana harga hari ini akan berbeda dengan harga yang akan datang. Rentang waktu yang berbeda dihitung sebagai bunga. Pemahaman nominal bunga antara masyarakat dengan perbankan menjadi berbeda, karena masyarakat pada umumnya tidak begitu menghitung dengan cermat tentang bunga, kecuali orang-orang tertentu yang secara status sosial dan ekonomi berkecukupan.

Pandangan masyarakat terhadap kredit berbeda-beda, sebagian responden menganggap kredit bermanfaat, karena mempermudah dan meringankan membayar barang yang dikendaki, pada saat tidak memiliki uang kontan untuk membayarnya. Ada juga responden yang berpendapat bahwa kredit perlu dihindari karena kredit dapat menjerat kita dalam utang-piutang apabila tidak dapat membayar cicilan. Ada responden yang mengatakan sebaiknya jangan coba-coba dengan kredit, karena kadang kala kita akan ketagihan, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari jeratan hutang piutang. Beragam pandangan masyarakat tentang tentang kredit.

Berbagai alasan, mengapa seseorang melakukan kredit ke lembaga keuangan secara formal, antara lain untuk menambah modal usaha, ada yang digunakan untuk membangun rumah, kebutuhan konsumsi rumah tangga, membeli perabot rumah tangga, sebagai dana pendidikan, dan sebagainya. Jadi

pinjaman kredit digunakan bukan untuk usaha yang produktif karena sifatnya konsumtif. Dalam hal ini, menurut seorang responden “ tidak semua finance membunuh para nasabahnya, akan tetapi kita yang harus pandai memilih finance yang sehat dan menerapkan bunga yang rendah”. Kredit sudah dipahami sebagai hal yang lumrah, yang penting harus hati-hati dan cerdas dalam memilih lembaga perkreditan. Beberapa responden sudah memahami tentang sistem perkreditan yang dianggap dapat menguntungkan keduanya. Pemahaman tersebut berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta tempat tinggal dari responden. Pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan yang juga berpengaruh terhadap pendapatan, sehingga mereka dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian secara ekonomis.

Di daerah yang masih jauh dengan keberadaan lembaga perbankan, masyarakat melakukan utang piutang atau kredit pada lembaga yang mereka ketahui. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan masih terpaku kepada utang piutang yang dianggap mudah, yaitu kepada rentenir. Secara tradisional, sistem rentenir sudah dikenal oleh masyarakat, hanya saja sifatnya tidak seimbang. Hal ini sudah disadari oleh masyarakat, akan tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari sistem rente yang tinggi. Kepercayaan merupakan kunci untuk ikatan kuat antara rentenir dengan nasabah. Pinjaman diberikan secepatnya, tanpa syarat yang sulit, akan tetapi akibatnya bunga menjadi tinggi, karena para rentenir menanggung beban terutama kerugian secara pribadi. Untuk meminimalkan kerugian, maka bunga yang diterapkan menjadi tinggi. Di sisi lain, nasabah tidak terlalu pusing dengan bunga tinggi, yang penting uang dapat diterima secepatnya. Nasabah baru merasakan sulitnya melunasi utang, setelah terjatuh dalam utang piutang yang tidak berkesudahan.

Para responden dengan tingkat pendidikan menengah atas dengan ekonomi yang mencukupi, mulai cerdas memutuskan utang piutang. Mereka sudah mulai sadar bahwa pinjam uang jangan asal pinjam, kalau tidak terpaksa sekali baru pinjam. Pada umumnya, mereka melakukan transaksi pinjam uang dengan jumlah kecil kepada saudara atau teman dekat, sehingga utang dapat dilunasi tanpa bunga yang mencekik. Syaratnya saling percaya, dan hutang harus dikembali sesuai

dengan komitmen bersama. Permasalahan akan datang, apabila seseorang memerlukan kontan dalam jumlah besar. Bagaimana mereka menanggulangnya. Beberapa responden yang berada di perkotaan mengatakan “ menyisakan gaji bulanan untuk ditabung sedikit-demi sedikit, dan mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting” tetapi apabila terpaksa ya pinjam ke lembaga perbankan, diusahakan cari yang bunganya kecil”. Berbeda dengan responden yang ada di desa yang jauh dari fasilitas perbankan, maka mereka berusaha meminjam kepada para rentenir yang dianggapnya dapat memenuhi kebutuhan uang kontan yang diperlukan tanpa berpikir panjang tentang bunga tinggi yang diterapkan. Faktor lingkungan serta akses terhadap lembaga perbankan mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Beberapa responden yang tinggal di perkotaan, rata-rata melakukan aktivitas kredit untuk mendapatkan alat transportasi, yaitu sepeda motor. Mereka berusaha mencicil sepeda motor dengan cara menyisihkan gajihnya, sehingga tidak menjadi problem perhutangan. Di sisi lain, warga pedesaan yang tidak mendapat penghasilan tetap, kredit sepeda motor pun menjadi permasalahan ekonomi keluarga. Masyarakat pedesaan yang mengandalkan pendapatannya dari panen yang tidak rutin, sulit untuk membayar angsuran secara rutin sepeda motornya, sehingga pada saat tidak memiliki uang untuk mengangsurnya beberapa bulan, maka ia kena finalti yang pada akhirnya motor akan diambil oleh finance yang memberikan kredit motor tersebut. Pada umumnya masyarakat di pedesaan, warganya banyak yang membeli kendaraan, barang elektronik, serta barang keperluan rumah tangga lainnya dengan cara mengangsur, pada saat panen tiba. Pada saat *paceklik*, barang-barang yang diangsur seperti sepeda motor dijual atau diambil oleh finance. Hampir setiap waktu kejadian ini terulang, akan tetapi masyarakat sepertinya tidak merasa keberatan kendaraannya diambil oleh finance setelah membayar beberakali angsuran. Gejala ini hanya diterima secara pasrah oleh masyarakat, dengan harapan apabila panennya berhasil kelak akan membeli kembali barang yang diinginkan.

Pemerintah berusaha untuk memberikan kredit lunak kepada masyarakat, terutama di pedesaan. Kredit yang diberikan untuk modal, agar masyarakat

menjadi produktif dan dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Di setiap daerah berbeda dalam mengelola kredit yang bersal dari pemerintah. Dari beberapa daerah yang diberi kemudahan perkreditan, hanya daerah tertentu yang berhasil menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan produksi dan pada akhirnya berpengaruh bagi peningkatan ekonomi rumah tangga mereka.

Sejak tahun 1970-an, kemiskinan sudah menjadi perhatian pemerintah, permasalahan kemiskinan menjadi perhatian para akademisi dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) juga. Komunikasi di antara ketiganya, melahirkan berbagai kebijakan yang pada dasarnya untuk mengentaskan kemiskinan. Program-program digulirkan, yang pada intinya membuat masyarakat miskin menjadi berdaya. Sekitar tahun 1994 muncul inptres yang elandasi praktik dari dikursus kemiskinan ras dan etnis (Agusta,2015:214). Ada bantuan berupa Tabungan Kesejahteraan keluarga (Takestra) dan kredit usaha kesejahteraan (Kukesra). Kemudian IDT, Program P3KT. Setelah krisis monerter melanda Indonesia sekitar tahun 1998, ada program pemberian bantuan tunai, antara lain Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Program Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin atau Raskin. Bahkan kemudian dikembangkan Program Kegiatan Kecamatan (PKK). Pada tahun 2008 dikermbangkan Program PNPM (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) di perkotaan dan perdesaan. Progran PNPM menggabungkan komponen kelompok dan infrastruktur.

Salah satu bentuk keberhasilan dana pemerintah yang dikelola masyarakat adalah, PNPM di Desa Sumberejo Kecamatan Bangorejo Kabubapatenn Banyuwangi. PNPM ini telah berjalan dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang modern dan menguntungkan mereka.

Program pemerintah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukerejo Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu program pemerintah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program PNPM di Desa Sukerojo merupakan PNPM kota yang diketua oleh Bapa Syamsudin, jenisnya simpan pinjam, anggotanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dibentuk sekitar tahun 2008-an, dengan modal awal sekitar Rp. 200.000.000,. dan jumlah anggota sekitar 50

orang, terdiri dari beberapa kelompok, sesuai dengan jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Sistem peminjaman bergulir, intinya saling membantu. Program kredit ini adalah usaha simpan pinjam.

Anggota koperasi pada umumnya adalah pengrajin, pedagang, atau ada yang merintis usaha atau industri rumahan. Dengan demikian para nasabah meminjam uang untuk modal usahanya. Kredit dijalankan bukan berdasarkan perorangan, akan tetapi berdasarkan kelompok yang memiliki usaha yang sama. Hal ini sesuai dengan keharusan yang diprogramkan dalam PNPM. Maksudnya agar mempermudah pemberian kredit dan usaha mereka. Sistem peminjaman kelompok lebih efektif dan efisien. Ketua kelompok ditunjuk berdasarkan ketangguhan, dan secara ekonomi sudah mapan, sehingga mereka dijadikan patron oleh anggota kelompok yang lain. Jumlah anggota kelompok antara 5-10 orang. Ketua bertanggung jawab terhadap proses peminjaman dan angsuran tiap bulannya. Anggota menerima pinjaman untuk menjalankan usahanya, dan bertanggungjawab melunasi utangnya yang dianggsur secara berkala kepada ketua. Ketua bertanggungjawab membereskan pelunasan pinjaman kelompoknya kepada lembaga PNPM.

Keberhasilan ketua kelompok mengelola dan membimbing para anggotanya, serta memberi arahan yang tepat untuk menggunakan pinjaman sebagai modal usaha produktif, sangat menentukan keberlangsungan koperasi ini. Kepatuhan para anggota terhadap ketua untuk melunasi pinjamannya merupakan kepatuhan yang sifatnya patron klien, sehingga antar anggota dan ketua terjalin kerjasama yang baik. Ikatan kekeluargaan anggota dan ketua membentuk rasa solidaritas bersama. Solidaritas inilah yang dapat mengikat mereka dalam perasaan yang sama, yaitu menjalankan usaha dengan baik dan melunasi utang dengan lancar, bahkan diusahakan tidak menunggak angsuran agar kerja kelompok tetap berjalan lancar.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, maka sekarang sistem yang diterapkan dalam peminjaman merupakan peminjam kelompok per-usaha yang sejenis, dengan cara bapa asuh, maksudnya dalam satu kelompok terdiri atas 1/3 warga yang dianggap mampu karena usahanya telah maju sebagai patron atau

bapa asuh, sedangkan 2/3 anggota kelompoknya adalah masyarakat yang perlu diberdayakan. Dengan demikian, dalam setiap kelompok peminjam ada yang bertanggung jawab, yaitu yang dianggap maju usahanya sebagai bapa asuh. Kelompok ini sebagian bergerak di bidang usaha rumahan, kerajinan, pedagang. Aktivitas di bidang usaha, sebagian ada yang sudah maju, sebagian masih dalam rintisan usaha, seperti usaha industri rumah.

Agar kelompok bertanggungjawab terhadap utang piutangnya, maka kelompok yang akan meminjam uang harus menyertakan jaminan sebagai tanggungan. Jaminan berupa barang berharga, pada umumnya barang berharga berupa sertifikat tanah. Dengan adanya jaminan ini membuat ketua dan anggota kelompok menjadi bertanggungjawab untuk melunasi pinjamannya. Apabila pinjaman tidak dilunasi maka jaminan menjadi tanggungan pinjaman. Hanya saja sampai menurut pengurus, sampai sekarang tidak ada permasalahan yang rumit yang berkaitan dengan jaminan sebagai tanggungan hutang, karena hampir semua kelompok tidak bermasalah dalam mengangsur pinjaman. Ada beberapa permasalahan, akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Terutama pada saat belum dapat melunasi pinjaman, karena ada beberapa anggota kelompok yang belum dapat mengangsur karena usahanya tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, atau mengalami kemacetan. Hal ini ditangani dengan cara diberi penangguhan pembayarannya, hanya saja bunga tetap dibayar. Cara penangguhan yang bersifat manusiawi, cukup ampuh bagi para peminjaman, karena mereka merasa sangat dibantu. Apabila sudah ada uang, maka mereka akan menyetorkan uangnya kepada ketua kelompok, agar tidak menghambat anggota lainnya yang memerlukan modal dikemudian hari. Ada pula ketua kelompok yang baik hati, menanggulangi pelunasan, nanti anggotanya membayar kekurangan pinjaman, sesuai dengan jumlah yang harus diangsurnya kepada ketua kelompok. Tanggungan dalam peminjaman adalah berharga bukan barang (emas), ini yang mengikat kelompok untuk saling mengingatkan akan utang yang harus dibayarkan. Pada umumnya surat berharga ini milik ketua kelompok, karena ketua kelompok merupakan orang yang dianggap mampu dan sukses dalam berusaha. Sistem ini berhasil mengangkat usaha produktif anggota kelompoknya. Baik

ketua maupun anggota menjadi mandiri secara ekonomi, terutama anggota kelompok merasa sangat terbantu dalam kehidupan ekonomi sehari-hari karena usahanya dapat berjalan.

Besaran pinjaman kelompok sekitar 10-20 juta, terikat kepada surat berharga yang dianggunkan di koperasi. Jangka waktu pengembalian pinjaman sekitar dari 4 bulan hingga 24 bulan, bergantung kepada kesanggupan kelompok. Bunga yang diterapkan bunga tetap atau flat. Angsuran ada yang harian ada yang bulanan. Pinjaman dengan angsuran harian dan mingguan dikenakan bunga 2% perbulan, dalam jangka waktu 4 bulan. Adapun pinjaman dengan angsuran bulanan bunga 1.5% per bulan, dengan jangka waktu pengembalian antara 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, sampai 24 bulan.

Pengelolaan kredit ini dilakukan oleh pengurus dengan penuh tanggungjawab. Pengurus berusaha untuk menyeleksi kelompok yang akan meminjam, menaksir jaminan, serta memperhatikan angsuran dan batas pelunasan setiap kelompok. Pengurus berusaha meningkatkan pelayanan melalui pelatihan dan kejujuran dalam mengelola. Para pengurus berusaha mengelola koperasi secara profesional seperti lembaga perbankan modern, tanpa menghilangkan tradisi dalam mengatasi permasalahan pembayaran, agar tidak macet di tengah jalan. Kearifan lokal berupa ikatan patron klien, ikatan desa, serta kejujuran pengurus, dan kepercayaan anggota terhadap pengurus dan ketua kelompok, mengakibatkan koperasi ini dapat berjalan sampai sekarang.

Modal koperasi sekarang sudah berjumlah Rp. 650.000.000, Keuntungan yang diperoleh koperasi dikembali kepada masyarakat dalam bentuk: 10 % untuk UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) desa. 10% untuk UPS (Unit Pengelola Sosial), seperti warga desa yang berada di bawah garis kemiskinan atau para jompo yang memerlukan perbaikan rumah.10% untuk UPK (Unit Pengelola Keuangan) atau pengurus. Rata-rata untuk kegiatan UPS sekitar Rp.12.000.000,. Sisa keuntungan dijadikan modal simpan pinjam kembali. Jadi keberadaan koperasi sangat dirasakan bermanfaat, bukan saja oleh anggota koperasi, melainkan juga oleh masyarakat sekitarnya.

Bantuan pemerintah, dengan program pengentasan kemiskinan yang direspons secara positif oleh pengurus dan anggota koperasinya, merupakan hal yang harus diapresiasi oleh semua pihak. Keberhasilan tersebut perlu dikaji agar dapat menumbuhkan rasa yang sama di daerah yang belum dapat mengembang dan merespon dengan baik program-program bantuan pemerintah. Dari beberapa daerah memang desa Sukorejo, merupakan desa yang sukses mengembangkan dan mengaplikasikan program PNPM.

Di beberapa daerah, program PNPM tidak dapat berjalan dengan lancar, terutama dalam pengembalian pinjaman, yang mengakibatkan modal tidak dapat digulirkan kepada peminjam lainnya, atau mengalami kemacetan. Pihak kerawat desa tidak dapat mengintervensi kemacetan ini, karena pada umumnya mereka berada di luar kepengurusan PNPM. Pengurus, ketua kelompok, dan anggotalah yang harus dapat mengelola simpan pinjamnya. Padahal, menurut salah seorang kerawat desa, “apabila PNPM dapat berjalan dengan lancar, maka warga desa pun akan mendapat keuntungannya, karena akan mendapat persentase dari keuntungan untuk membangun fasilitas umum di desa, atau untuk memperbaiki jalan desa, dan sebagainya”. Salah seorang responden pun menyayangkan di desanya PNPM tidak dapat berjalan lagi, padahal ia sempat meminjam uang, dan merasakan untungnya, karena bunga kecil. Alasan tidak jalan kembali koperasi PNPM nya ia tidak tahu betul, hanya yang ia dengar pengembaliannya tidak lancar. Berulang kali ia menyatakan rasa prihatinnya.

Pada dasarnya, masyarakat kecil merasa senang dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Bantuan yang diberikan dengan bunga rendah dirasakan sangat membantu keuangan mereka. Akan tetapi masyarakat perlu bimbingan dan pembinaan cara pinjam dan memanfaatkan uang pinjaman tersebut. Para pengurus yang bebar-benar berdedikasi dan jujur dalam mengelola keuangan simpan pinjam, dapat menumbuhkan kepercayaan warga, dan mereka bertanggungjawab mengembalikan pinjaman dengan penuh kesadaran, bukan karena takut seperti pada saat tidak dapat membayar hutangnya kepada para rentenir. Partisipasi anggota koperasi menjadi dinamis setelah mereka merasakan manfaat yang besar, terutama dalam usaha-usaha yang produktif. Di sinilah peran

ketua kelompok, dan pengurus mengarahkan penggunaan uang pinjaman untuk modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli barang yang tidak berkaitan dengan usaha, atau konsumtif.

Koperasi simpan pinjam di Desa Sukorejo dapat sukses karena menggunakan pola-pola kerja sama, gotong royong, serta tanggung jawab antara pengurus, nasabah warga yang dianggap kaya serta warga yang dikategorikan miskin dan perlu bantuan. Pengurus yang bersih, di mana faktanya tidak ada yang penyalahgunaan wewenang. Bentuk koperasi ini mengkombinasikan suatu kegiatan fungsional dengan lembaga keuangan modern dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional. Keberhasilan PNPM di Desa Sukorejo, merupakan salah satu contoh dari dedikasi serta kejujuran dari para pengurus dan ketua kelompok, dalam mengelola serta mengarahkan uang pinjamannya. PNPM simpan pinjam ini, dimanfaatkan oleh para anggotanya untuk merintis usaha, atau menambah modal bagi anggota kelompok yang usahanya telah maju. Sistem bapak angkat secara budaya, merupakan sistem yang dapat menumbuhkan solidaritas sosial di Desa Sukerojo ini.

Bapak angkat identik dengan patron klien, akan tetapi dalam hal ini sudah ada sedikit perubahan atau pergeseran fungsi patron klien karena adanya perkembangan sosial dalam, masyarakat itu sendiri. Apabila terjadi perkembangan yang mengarah kepada perubahan kebudayaan yang menumbuhkan fungsi baru atau berbeda, maka masyarakat tersebut sudah terintegrasi secara fungsional. Peralihan dari integrasi struktural ke fungsional karena meningkatnya perbedaan sosial dalam masyarakat, yaitu meningkatnya pembagian kerja. Semakin banyak bentuk solidaritas organik diperlukan untuk mengkoordinir dan memperkuat heterogenitas yang baru muncul.

Menurut Durkheim (2000) suatu masyarakat yang terintegrasi secara fungsional terikat satu sama lain oleh hukum restitutorif (balas jasa), sedangkan masyarakat yang terintegrasi secara struktural dibentuk oleh hukum represif (Kartodirdjo, 1987:255). Jadi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tanggungjawab, perlu disosialisasikan hukum represif selain restitutorif, dalam hal ini anggungan berupa sertifikat tanah milik ketua kelompok, merupakan jaminan

yang harus ditebus kembali bersama anggota. Peranan dan kewibawaan ketua kelompok dan ketaatan anggota saling berpengaruh. Ikatan tradisional mengakibatkan rasa sungkan dari anggotanya, ikatan hukum respresif melahirkan rasa tanggungjawab dari anggota dan ketua untuk melunasi pinjamannya.

Jadi bantuan pemerintah untuk warga tidak mampu berupa pinjaman dengan bunga lunak, setidaknya harus dikonsepskan dan disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menganggap sebagai uang hibah dari pemerintah. Pemahaman bantuan sebagai hibah, mengakibatkan bantuan itu tidak akan efektif dan efisien.

Apabila dikaji lebih jauh antara Mitra Bahari Desa Kilensari dengan Koperasi PNPM desa Sumberejo, adalah sama-sama koperasi simpan pinjam, ada anggunannya berupa barang berharga, dikelola sesuai dengan kearifan lokal. Dedikasi pengurus yang tinggi, nilai kejujuran, saling percaya. Perbedaannya adalah Mitra Bahari ditujukan untuk personal atau pribadi sedangkan PNPM Sukerejo untuk kelompok-kelompok. Suatu contoh yang perlu dikaji lebih lanjut, karena masyarakat desa pun mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga pengaplikasian suatu kebijakan tidak dapat diseragamkan.

V KESIMPULAN

1. Pola kehidupan ekonomi masyarakat Madura dan Jawa masih belum banyak beranjak dari tradisi subsisten dengan pola budaya agraris, di mana masyarakat memandang uang masih dalam pengetahuan *special money*, yaitu uang dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial di samping ekonominya. Sementara kehidupan masyarakat yang berada di perkotaan sudah mulai bergeser kepada pola kehidupan ekonomi pasar hanya belum sempurna, dalam arti sudah realistis dalam memandang uang, tetapi masih terikat dalam beberapa tradisi yang berkaitan dengan pandangan uang sebagai alat perekat kekeluargaan, artinya fungsi uang belum sebagai alat ekonomi semata.
2. Persepsi tentang utang berkaitan dengan pinjam meminjam dalam arti pertukaran atau pengembalian, bentuknya sosial, barang, atau uang. Pertukaran yang berkaitan dengan sosial dikaitkan kepada utang sosial, sedangkan utang piutang uang berkaitan barang dan uang. Adapun kredit berkaitan dengan utang piutang yang berkaitan dengan barang dan uang, dan ada jangka waktu pengembalian. Kredit dapat berupa kredit formal maupun in formal. Kredit formal berasal dari lembaga keuangan resmi, dalam arti ada peraturan yang mengikat antara lembaga keuangan dengan nasabah secara tertulis, sedangkan kredit informal cenderung aturannya bersifat konvensional tanpa ada kejelasan atau kontraktual. Lembaga keuangan yang resmi sering dimanfaatkan oleh kelas menengah atas yang telah memahami sirkulasi keuangan, adapun kelas bawah dan yang berada di pedesaan cenderung masih bernalung kepada lembaga keuangan yang tidak resmi. Alasannya tingkat pendidikan yang masih rendah, penghasilan yang masih rendah, serta budaya yang masih mengikat mereka kepada para *tengkulak*, rentenir, serta para kreditor tidak resmi lainnya.
3. Pada awalnya masyarakat berutang kepada para rentenir secara personal, bagaimana para rentenir memproduksi budaya utang untuk menjalankan perniagannya secara tradisional atau informal. Sejak adanya keinginan sebagian tokoh dan warga masyarakat yang berempati dan berpihak kepada warga miskin, maka terjadi perubahan konsep hutang dan kredit secara

perlahan-lahan. Budaya utang dan kredit baru yang secara institusi bersifat modern dan menguntungkan bersama mulai dilakui masyarakat dan dapat berjalan secara perlahan-lahan. Budaya utang bersinergi dengan utang pada institusi modern yang dikelola berdasarkan kearifan lokal, mengakhiri budaya utang tradisional. Mekanisme utang berubah, masyarakat menyadari tentang konsep utang beserta bunga, dan bertanggungjawab terhadap kewajibannya, serta berusaha untuk menyelesaikan permasalahan utang secara formal dan baik.

3. Sistem kredit modern yang lebih menguntungkan masyarakat umum yang diteliti dan berhasil memberdayakan masyarakat dalam proses pinjam meminjam adalah sistem kredit yang bersifat kontraktual dengan pendekatan yang bersifat patron klien dan ada jaminannya. Di sini terjadi semacam adanya rasa tanggung jawab terhadap barangnya sendiri yang disimpan di lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang menguntungkan pengurus dan nasabah adalah keuangan yang dapat profesionalisme seperti lembaga keuangan modern dengan prinsip-prinsip patron klien dan kearifan lokal serta dipadukan dengan sistem modern seperti anggaran, pembukuan yang modern, serta pengurus yang mempunyai kepedulian, penerapan berbagai pelatihan bagi pengurusnya secara rutin sehingga memahami permasalahan simpan pinjam, menjadi lembaga perkreditan rakyat dapat berjalan lancar.
4. Masyarakat merasa memilikilembaga keuangan mereka. Berbagai kemudahan ini sudah dapat dirasakan oleh paera nasabah yang memang warga masyarakat desa sekitar. Orientasi nilai tradisional telah efektif menunjang dan bukan menghalangi sedikit-tidaknya pada tahap pertama, adaptasi demikian merupakan adaptasi kearah eonomi rasional. Demikian juga fungsi modern beraeksi terhadap sikap radisdional untuk mengubah secara perlahan-perlahan. Suatu bentuk simbiosis antara struktur sosial yang lebih rasional yang menjadi proyeksi dirinya secara mendadak telah memungkinkan adaptasi para pengelola koperasi dengan nasabah terhadap kehidupan ekonomi.
5. Dalam perkreditan ada pergeseran pemahaman tentang kredit, walaupun masih terjadi di beberapa daerah, akan tetapi hal ini menunjukkan sudah terjadi

perubahan pandangan masyarakat terhadap kredit yang rasional. Masyarakat semakin berorientasi komersial dalam masalah-masalah ekonomi dan tidak lagi berorientasi agraris atau nelayan yang lebih bersifat *cosmos order* daripada *social order*. Cicilan yang kecil dengan bunga yang rendah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi hutangnya dan sesegera mungkin memiliki kembali barang berharga sebagai investasi hidupnya. Selain itu juga didukung pemasarannya produk olahannya yang semakin maju. Konsep kredit yang awalnya tradisional dan informal bergeser menjadi kredit modern yang bersinergi dengan utang pasar modern.

Pandangan budaya Masyarakat Madura dan Jawa tentang uang, utang, dan kredit tidak terlepas dari pandangan budaya mereka. Secara sosiologis, uang memiliki dua wajah, di satu sisi berwajah normatif di sisi lain berwajah pragmatis. Di antara keduanya terjadi dikrepansi atau kesenjangan yang tajam, antara bagaimana uang seharusnya digunakan tentunya berlandaskan norma-norma sosial dengan uang yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan praktis sehari-hari. Secara normatif, uang hanya sekedar instrumen ekonomi dan penggunaannya untuk hubungan sosial, tetapi secara pragmatis uang merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dapat membebaskan orang dari berbagai bentuk kewajiban sosial, bisa meningkatkan kapital budaya, dan menjadi instrumen kekuasaan personal yang riil yang ada dalam saku pemiliknya sehingga dapat mempengaruhi orang lain.

Tradisi Madura dan Jawa tidak terlepas dari pengertian sistem timbal balik yang melahirkan pandangan uang tidak terlepas dari fungsi sosialnya selain fungsi ekonomi. Peran Uang dianggap sangat penting, dan sebagian besar pengeluaran lebih dicadangkan untuk hubungan sosial., kecuali sebagian kecil masyarakat yang menganggap peran sosial sudah pudar. Pergeseran pandangan masyarakat tentang hubungan timbal balik terjadi, karena ikatan tradisi sudah agak longgar, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah baru, perumahan, atau tingkat pendidikan yang tinggi yang dapat menggunakan rasionalitas dalam pengalangan ekonomi rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Antropologi Sosial dalam Pembangunan*. Bandung: Transito.
- Agusta, Ivanovich. 2014. *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan Di Pedesaan*. Jakarta. Departemen Sains komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Berger, B. 1991. *The Culture of Entrepreneurship*. San Fransisco: ICS Press.
- Besseling, O.P. 1919. *Het Nederlandsch Indisch Volkscredietwezen*. S'-Gravenhage: Hollandia-Drukkerij.
- Boeke, D.H. 1926. "Inslansche Budgetten", *Koloniale Studien*. Tiende Jaargang.
- . 1983. *Pra Kapitalisme di Asia*. Terjemahan D. Projosiswoyo. Jakarta: Sinar harapan.
- Boomgaard, P.J. 2004. *Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta. Jambatan.
- Burger, D.H. 1967. *Sejarah Sosiologis Indonesia*. Djakarta: Djambatan.
- Cramer, J.C.I. 1929. *Het Volkscredietwezen In Nederlandsche*. Weltreveden: G. Kolff.
- Creutzberg, Pieter dan J.T.N. Van Laanen. 1987. *Sejarah Statistk Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Damsar. 2006. *Sosiologi Uang*. Padang. Andalas University Press.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1989. *Kredit Rakyat di Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES.
- Furnival. 2000. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan bambu.
- Geertz, Clifford. 1987. " Keyakinan Religius dan Perilaku Ekonomi di Sebuah Desa di Jawa Tengah : Beberapa Pemikiran awal ", dalam Colletta, Nat J. dan Umar kayam. *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah pendekatan terhadap Antropologi Terapan Di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor. Hal. 49-100.
- Geertz, Clifford. 1987. " Perkumpulan Kredit Bergilir;"Tahap Menengah" Dalam Pembangunan", dalam Colletta, Nat J. dan Umar kayam. *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah pendekatan terhadap Antropologi Terapan Di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor. Hal. 164-201.
- Geertz, Cliiford. 1989. *Penjaja dan Raja : Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Penerjemah S. Supomo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gunarto, Imam. 2012. *Infrastruktur Ekonomis Abad XIX: Pembangunan Jalan raya Daendels sebagai Media Integrasi Ekonomi Di Wilayah Priangan*. Jakarta: Limas.
- Handayani, Sri Ana. 2012. *Dinamika Perkreditan Di Priangan Tahun 1900-1942*. Desrtasi. Universitas Padjadjan Bandung.
- Henley, David. 2009. " Credit and Debt in Indonsian History : An Introcdution ", David Henley and Peter Boomgaard. *Credit and Debt in Indonesia, 860-*

- 1930 from Peonage to Pawnshop, From Kongsi to Cooperative*. Singapura: ISEAS Publishing. P. 2 (1-40).
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial Di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. "Gotong Rtoyong : saling Menolong dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia", dalam Colletta, Nat J. dan Umar kayam. *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah pendekatan terhadap Antropologi Terapan Di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor. Hal. 254- 271.
- Kayam, Umar.1987. " Kebudayaan dan Pembangunan? ", dalam Colletta, Nat J. dan Umar kayam. *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah pendekatan terhadap Antropologi Terapan Di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor. 307-309.
- Kayam, Umar.1987. " Keselaran dan Kebersamaan : Suatu Penjelahan Awal", dalam Colletta, Nat J. dan Umar kayam. *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah pendekatan terhadap Antropologi Terapan Di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor. Hal 101-126
- Kontowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*: Yogyakarta. Jurusan Sejarah Fakultas Satra dan Universitas Gadjah Mada
- Kontowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta.Tiara Wacana.
- Labovits, S. Dan R. Hagedorn. 1982. *Metode Riset Sosial*. Erlangga. Jakarta.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya . Batasan Pembaratan*. Jilid I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, 1989. *Metode Peneltian Sosial*. Erlangga. Surabaya.
- Mudyahardjo. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Universitas Pendidikan Press.
- Nawawi, H. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Erlangga. Jakarta.
- Nugroho, Heru. 2002. *Uang, Rentenir, dan utang Piutang di Jawa*. Jogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Onghokham. 2002. *Dari Priyayi Sampai Nyi Blorong*. Jakarta: Buku Kompas.
- Partadirdja, Ace. 1989. *Perkreditan Di Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Polanyi. Karl.1957. *The Great Transformation: The Political and and Economic Origine of Our Time*. Boston : Beacon Press.
- Rahman, Bustami, 2008. " Karakter Orang Madura di Surabaya". Dalam *Kultur*. Jember: Pusat Penelitian Budaya Jawa dan Madura Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Reid, Anthony. 1992. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Schoorl. 1981. *Modernisasi. Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang*. Jakarta. Gramedia.
- Scott, James. 1994 *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Jakarta: YOI.
- Shceltema, A.M.P.A. 1927." De Ontwikkeling van de Agrarische toentanden in Priangan". Dalam *Landbouw, Tijdschrift der Vereeniging van Landbouw Consulemen in Nederlandsch-Indie*. Derde Jrg.
- Sinungan,Muchdarsyah.1991. *Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soetarto, Ayu. 2004. "Pendekatan Budaya: Wacana Tandingan untuk Mendukung Pembangunan di Propinsi Jawa Timur. Dalam Ayu Soetarto dan Setya Yuwana Sudikan. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Propinsi Jawa Timur*. Jember: Kompyawisda bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Sparadley, J. 1979. *The Ethnographic Interview*. New York. Holt.
- Surya, Maulana Kusunah. 2003." Sopan, hormat, dan Islam: Ciri-ciri Orang Madura". Dalam Soegianto (ed.). Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura. Jember: Tapal Kuda.
- Van Gutem, V.B. 1919." Tjina Minding Eenige Aanteekeningen Over Het chineesche Geldshietterwezen op Java ", *Koloniaale Studien*.
- Van Laanen, J.T.M. 1988." Di Antara de Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit Di Indonesia pada Zaman Kolonial ", Anne Booth; Malley William; Anna Weidemann (peny.). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta. LP3ES.
- Van Laanen, J.T.M. dkk. 1987. *Changing Economy in Indonesia : money and Banking 1816-1940*. Vol. 6 Amsterdam: Martinus Nijhooff Publishers B V, The Hague.
- Wasino. 2008. Kapitalisme Bumiputera Perubahan Masyarakat Mangkunegaran. Yogyakarta: LKiS.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Masa Transisi : Studi Perubahan Sosial*. Terjemahan Misbah zulfa Ellizabet. Yogya: Tiara Waca. Hlm : 65.
- Wolter, Willem G. 1980. " Lembaga Kredit Rakyat dan Penelitian tentang Keterlibatan Hutang pada Masa Kolonial". Dalam *Carawala*.
- Zelizer, Viviana A. 1994. *The Social Meaning of Money*. New York: Basic.

Surat Kabar

- Agusta, Ivanovich.2015. Membalik Pendamping Desa. *Kompas* 4 Mei 2015. H
- Kompas, 2015. Masyarakat Pinjam Tengkulak : Permudah Akses terhadap Perbankan. *Kompas*,4-05-2015. Hal.20.
- Nafis, Abdul Wadud. 2014. "Bahaya Utang". Radar Jember, *Jawa Pos*. 26 Agustus 2014. Hal. 8
- Wijaya, Krisna, 2014. " Bank Pertanian". *Kompas* 23 Agustus 2014. Hal.6

Daftar Responden

Nurkamila (27 thn), Hanifah (34 thn), Sulima (55 thn), Busani (40 thn), Zainul Arifin (39 thn), Miswa 937 thn), Nurifa (48 thn), Sunarmi (58 thn). Siti Rokaiyah (35 thn), Supyani, (38 thn), Serly, (32 thn), Musriyono (27 thn), Indrawati (37 thn), Satiyem (53 thn), Noval (48 thn), Leni (48 thn), Edi Suprpto (29 thn), Elly (27 thn), deny Herawati (23 thn), Sudarmi (51 thn), Heru Purwanto (48 thn.), Akhmd Radityo (28 thn), Rosita Nurjana (27 thn), Taufik Hidayat (30 thn), Sri Suryani (44 thn), sheila yeyenita (24 thn), Winarti (38 thn), Muhammad Ridwan, 54 thn), Hasan Basri (44 thn), Siswanto (55 thn), Misiyem (68 thn), Wike Achsan (55 thn), Dewi Arisanti (35 thn), Reni (20 thn), Aris (40 thn), Ima (30 thn),

Suyitno (50 thn), Hasanah (45 thn), Ishak (25 thn), E. B. Arifien (56 thn),
Trisnawati (55 thn), Hartono (49 thn).

Foto Kegiatan Di Lapangan



Tim Peneliti Sedang mewawancarai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.



Tim Peneliti sedang menggali data di Dinas Parawisata Bondowoso



Tim Peneliti Menggali data tambahan di desa Pujer Baru Bondowoso dengan salah seorang kerawat desa



Menggali data tambahan di Desa Kilensari kecamatan Kabupoaten Bondowoso



Susunan Pengurus Koperasi Mitra Bahari di Desa Kilensari, Kabupaten Situbondo.



Kegiatan Koperasi, salah seorang pengurus sedang menaksir barang jaminan untuk menentukan jumlah nominal pinjaman.



Contoh undangan yang berkaitan dengan besar uang yang akan disumbangkan. Undangan dengan bahan sabun mandi, nilainya antara Rp. 20.000,-Rp. 30.000,.